



**KEMITRAAN PEMERINTAH DAERAH DAN NON
GOVERNMENTAL ORGANIZATION (NGO) DALAM
PENGURANGAN RISIKO BENCANA DI KECAMATAN PANTI
KABUPATEN JEMBER**

***PARTNERSHIP OF LOCAL GOVERNMENT AND NON
GOVERNMENTAL ORGANIZATION (NGO) TO REDUCE
DISASTER RISK INSUB-DISTRIC PANTI AT JEMBER REGENCY***

SKRIPSI

**Oleh
Fitrotul Lathifah
NIM 070910201094**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2012



**KEMITRAAN PEMERINTAH DAERAH DAN *NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION (NGO)* DALAM
PENGURANGAN RISIKO BENCANA (PRB) DI KECAMATAN
PANTI KABUPATEN JEMBER**

***PARTNERSHIP OF LOCAL GOVERNMENT AND NON
GOVERNMENTAL ORGANIZATION (NGO) TO REDUCE
DISASTER RISK IN SUB-DISTRICT PANTI AT JEMBER REGENCY***

SKRIPSI

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk
menyelesaikan studi pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Oleh

**Fitrotul Lathifah
070910201094**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2012

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibuku Minggirotin dan Bapakku Basori, serta Ayahku Noor Mu'alim yang selalu setia memberi kasih sayang, dukungan dan do'a yang tulus.
2. Guru-guruku semenjak TK sampai dengan SMA yang senantiasa sabar dalam memberikan ilmu serta do'anya.
3. Calon suami dan anakku kelak, semoga kita bahagia selamanya.
4. Almamaterku tercinta Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (terjemahan Surat *Al- Hadiid* ayat 22) ¹

Kejayaan terbesar kita bukanlah karena kita tidak pernah jatuh, tetapi pada kebangkitan di setiap kali kita jatuh. ²

Ada hal yang tidak dapat kita kendalikan. ³

¹ Departemen Agama Republik Indonesia. 2009. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar

² Konfusius dalam Canfield, J. dkk. 2009. *Life Lessons*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

³ Chow, Stephen. 2008. *CJ7 Movie*. Hongkong: Columbia Pictures

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fitrotul Lathifah

NIM : 070910201094

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Kemitraan Pemerintah Daerah dan *Non Governmental Organization (NGO)* dalam Pengurangan Risiko Bencana di Kecamatan Panti Kabupaten Jember”. Adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2012
Yang menyatakan,

Fitrotul Lathifah
NIM 070910201094

SKRIPSI

**KEMITRAAN PEMERINTAH DAERAH DAN *NON*
GOVERNMENTAL ORGANIZATION (NGO) DALAM
PENGURANGAN RISIKO BENCANA (PRB) DI KECAMATAN
PANTI KABUPATEN JEMBER**

***PARTNERSHIP OF LOCAL GOVERNMENT AND NON
GOVERNMENTAL ORGANIZATION (NGO) TO REDUCE
DISASTER RISK INSUB-DISTRIC PANTI AT JEMBER REGENCY***

Oleh

Fitrotul Lathifah
NIM 070910201094

Pembimbing

Pembimbing Utama : Drs Agus Suharsono, M. Si

Pembimbing Anggota : Rachmat Hidayat, S. Sos, MPA

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Kemitraan Pemerintah Daerah dan Non Governmental Organization (NGO)* dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Kecamatan Panti Kabupaten Jember telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari/ Tanggal : Selasa, 19 Juni 2012

Pukul : 08.30 WIB

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Dra. Inti Wasiati, MM
NIP 19530731 198002 2 001

Drs. Agus Suharsono, M. Si
NIP 19630814 198903 1 003

Anggota Penguji:

1. Dr. Sutomo, M. Si
NIP 19650312 199103 1 003 (.....)
2. Hermanto Rohman, S. Sos, MAP
NIP 19790303 200501 1 001 (.....)

Mengesahkan
Dekan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.
NIP 19520727 198103 1 003

Kemitraan Pemerintah Daerah dan Non Governmental Organization (NGO) dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Kecamatan Panti Kabupaten Jember (Partnership of Local Government and Non Governmental Organization (NGO) to Reduce Disaster Risk in Sub-District Panti at Jember Regency)

Fitrotul Lathifah

*Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jember*

ABSTRAK

Pengurangan Risiko Bencana merupakan upaya yang dilakukan guna mengurangi dampak buruk terjadinya bencana. Dalam hal ini Pemerintah Daerah adalah sektor terpenting, akan tetapi dalam pelaksanaannya pemerintah pastilah memerlukan adanya kerjasama atau kemitraan dengan lembaga-lembaga nonpemerintah yang berperan dalam Pengurangan Risiko Bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola kemitraan yang terjadi antara Pemerintah Daerah dan NGO dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana yang dilakukan di Kecamatan Panti. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana bentuk kemitraan yang terjalin adalah kemitraan dengan model *Pseudo Partnership* atau kemitraan semu. Dimana kemitraan yang terjalin berawal dari terjadinya bencana alam banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa Kecamatan Panti pada tanggal 01 Januari 2006 lalu. Berawal dari peristiwa itulah pemerintah dan pihak NGO melakukan banyak kegiatan yang mana masing-masing pihak tidak sebenarnya menjalin kemitraan akan tetapi keduanya sama-sama merasa penting melakukan kerjasama dengan tujuan utama dalam rangka upaya Pengurangan Risiko Bencana di Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

Kata kunci : Pemerintah Daerah, NGO, Pengurangan Risiko Bencana, Kemitraan,

RINGKASAN

Kemitraan Pemerintah Daerah dan *Non Governmental Organization* (NGO) dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Kecamatan Panti Kabupaten Jember Nama: Fitrotul Lathifah, NIM: 070910201094, Jurusan: Administrasi Negara, Fakultas: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Bencana merupakan serangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan manusia yang disebabkan oleh faktor alam, nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Permasalahan mengenai bencana merupakan permasalahan yang menyangkut urusan-urusan publik. Penanganan terhadap bencana merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap rakyatnya dari risiko bencana. Akan tetapi dalam penanganan bencana tidaklah cukup hanya pemerintah saja yang berperan secara penuh, namun diperlukan adanya kerjasama atau kemitraan dengan lembaga-lembaga nonpemerintah yang dirasa mampu dan ahli dalam penanggulangan bencana.

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten di seluruh Indonesia yang tergolong rawan bencana. Hal tersebut dapat diketahui dari seberapa banyak kejadian bencana serta kerugian yang terjadi di Kabupaten Jember. Salah satunya adalah Kecamatan Panti yang pada tanggal 01 Januari 2006 mengalami bencana banjir bandang dan tanah longsor dan mengakibatkan banyak korban jiwa serta kerugian-kerugian infrastruktur. Mengingat Kabupaten Jember adalah kabupaten yang belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), maka sangatlah diperlukan bagi pemerintah daerah setempat untuk menjalin adanya suatu

kemitraan/kerjasama dengan lembaga-lembaga nonpemerintah yang ahli dalam penanggulangan bencana guna menangani permasalahan bencana di Kabupaten Jember.

Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pola kemitraan yang terjadi antara Pemerintah Daerah dan *Non Governmental Organization (NGO)* dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang dilakukan di Kecamatan Panti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif. Penentuan informan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yang kemudian dilanjutkan dengan *snowballing sampling*. Kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa pola kemitraan yang terjadi antara Pemerintah Daerah dengan NGO di Kecamatan Panti dalam Pengurangan Risiko Bencana lebih mengarah pada model kemitraan *Pseudo Partnership* atau kemitraan semu, yaitu merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Ada suatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa. Jadi, dengan kemitraan model tersebut pada intinya Pemerintah dan NGO sama-sama merasa penting melakukan kerjasama dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana, akan tetapi masing-masing pihak tidak saling memahami dan berjalan sendiri-sendiri meskipun pada dasarnya ke dua pihak tersebut memiliki tujuan utama yang sama yakni menjadikan Kecamatan Panti lebih maju dan tanggap bencana tanpa memperdulikan jabatan masing-masing pihak yang bermitra.

Dalam penulisan karya ilmiah ini dibagi menjadi lima bab. Pada bab I pendahuluan, peneliti menjelaskan latar belakang sampai metode penelitian pada bab III. Sedangkan bab IV dan V adalah hasil penelitian dan kesimpulan.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepala Allah SWT atas segala rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya tulis ilmiah yang berjudul “Kemitraan Pemerintah Daerah dan *Non Governmental Organizatin (NGO)* dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Kecamatan Panti Kabupaten Jember”. Karya tulis ilmiah ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember beserta jajarannya Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III.
2. Bapak Dr. Sasongko, M. Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Ibu Dra. Inti Wasiati, MM selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
4. Bapak Drs. Agus Suharsono, M. Si selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing I serta Bapak Rachmat Hidayat, S. Sos, MPA selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa sabar memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap penulis dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Camat Panti beserta perangkat Kantor Kecamatan Panti, Kades se Kecamatan Panti, warga desa-desa di Kecamatan Panti serta instansi-instansi yang secara sukarela memberikan bantuan atas kelancaran proses penelitian berlangsung.

6. Teman-teman seperjuangan AN'07 Pagi dan AN'07 Sore yang tak bisa disebutkan satu persatu namanya, terimakasih untuk suka duka bersamanya selama mencari ilmu di AN.
7. Kawan-kawanku, Ayu, Weny, Titin, Pi'i, Nyot, Nico, Intan, Pepen, Fla, Koko, Gendhon, dan semuanya yang senantiasa membuatku tersenyum.
8. Yang terdekatku, Ragariar Jati Juniarga yang telaten mebuatku mengerti arti kesabaran dan ikhlas, terimakasih untuk keberadaannya.
9. Sahabat-sahabatku dirumah dan keluarga besarku, terimakasih atas do'a serta dukungan setianya, atip insyaallah sarjana om, tante, mbah, adek2 dan tetangga-tetanggaku. Semoga tak pernah lelah mendo'akanku.

Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Admnistrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember pada khususnya.

Jember, Juli 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
1.3.1 Tujuan Penelitian	14
1.3.2 Manfaat Penelitian	14
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 <i>Governance</i>	16
2.2 Pemerintah Daerah	19
2.3 <i>Non Governmental Organization</i> (NGO)	23

2.4	Kemitraan Pemerintah Daerah dengan NGO	26
2.5	Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	32
2.5.1	Bencana	32
2.5.2	Penanggulangan Bencana	35
2.5.3	Pengurangan Risiko Bencana	37
BAB 3 METODE PENELITIAN		41
3.1	Tipe Penelitian	41
3.2	Fokus Penelitian.....	42
3.3	Lokasi Penelitian	43
3.4	Teknik Penentuan Informan	43
3.5	Teknik Pengumpulan Data	46
3.6	Teknik Analisis Data	48
3.7	Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	50
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		53
4.1	Hasil Penelitian	53
4.1.1	Gambaran Lokasi Penelitian	53
4.1.2	Kronologi Bencana Banjir Bandang di Kec. Panti	64
4.1.3	Peran Pemerintah dalam PRB di Kec. Panti	69
4.1.4	Peran <i>NGO</i> dalam PRB di Kec. Panti	83
4.1.5	Kemitraan Pemda dan <i>NGO</i> dalam PRB di Kec. Panti	96
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian	
BAB 5 KESIMPULAN		101
5.1	Kesimpulan	101
5.2	Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

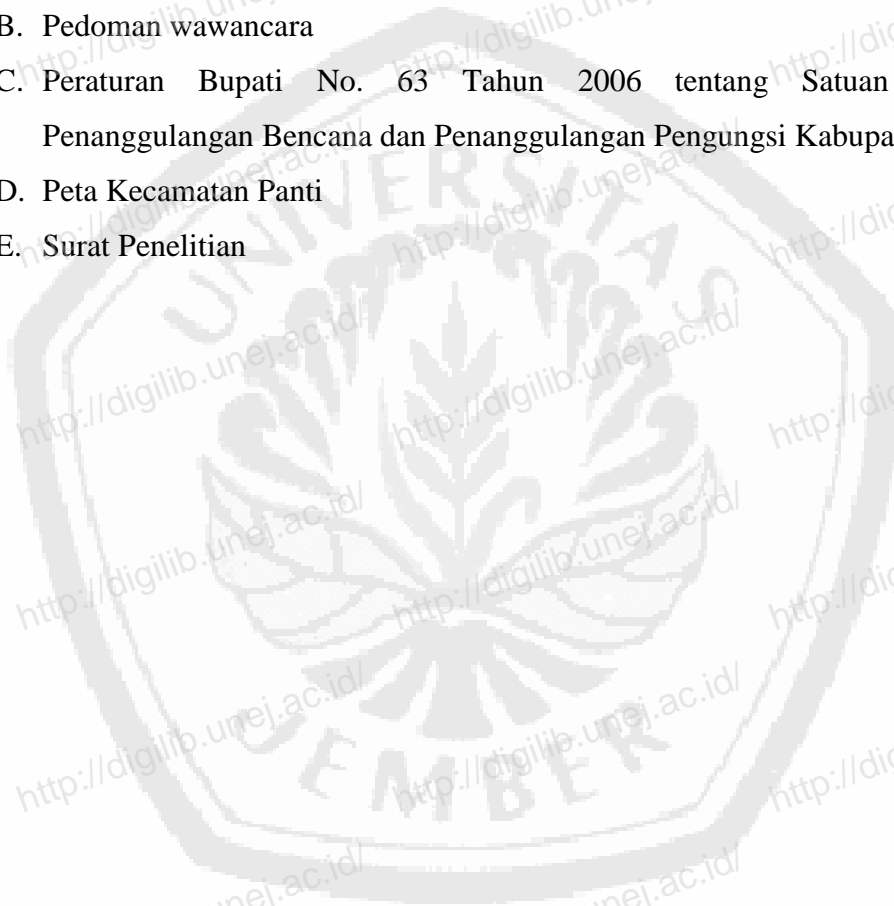
Tabel 1.1 Bencana yang terjadi di Kabupaten Jember	6
Tabel 1.2 Kerugian Innfrastruktur.....	10
Tabel 1.3 Daftar Pihak-pihak yang Bermitra dalam PRB di Kec. Panti	11
Tabel 4.1 Kronologi kejadian bencana	65
Tabel 4.2 Jumlah korban dan pengungsi per 6 Januari 2006	68
Tabel 4.3 Jumlah kerusakan infrastruktur	68
Tabel 4.4 Peran Pemerintah dan Kendala Pemerintah dalam Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana di Kecamatan Panti	82
Tabel 4.5 Lembaga-lembaga yang berkontribusi dalam Penanggulangan Bencana di Kecamatan Panti	87
Tabel 4.6 Peran NGO dan Kendala NGO dalam Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana di Kecamatan Panti	88
Tabel 4.7 Lembaga yang berkontribusi dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Kecamatan Panti	93
Tabel 4.8 Bentuk Kemitraan Pemerintan dengan NGO dalam Pengurangan Risiko Bencana di Kecamatan Panti	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Topografi Kecamatan Panti berdasarkan ketinggian wilayah.....	9
Gambar 2.1 Interaksi Domain <i>Governance</i>	17
Gambar 2.2 Siklus Penanggulangan bencana	36
Gambar 3.1 Proses Analisis Interaktif Miles dan Huberman	39
Gambar 4.1 Posko bencana alam Desa Suci	76
Gambar 4.2 Posko bencana alam Desa Kemiri	77
Gambar 4.3 Pos Pantau Antisipasi Bencana Desa Pakis	78
Gambar 4.4 Alat Pemantau Curah Hujan, Suhu, dan Arah Angin di Desa Pakis	89
Gambar 4.5 Monitor Pemantau Curah Hujan, Angin, dan Suhu	90
Gambar 4.6 Alat Perekam Data dan Komputer	91
Gambar 4.7 Alat Pemantau Curah Hujan, Suhu dan Arah Angin di Desa Kemiri	92
Gambar 4.8 Bagan Alur Proses Teerjadinya Kemitraan	98

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Susunan keanggotaan satuan pelaksana penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi Kabupaten Jember
- B. Pedoman wawancara
- C. Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2006 tentang Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Pengungsi Kabupaten Jember
- D. Peta Kecamatan Panti
- E. Surat Penelitian



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terletak pada posisi silang antara dua benua besar dan dua samudera besar, Indonesia juga berada di atas lempeng benua yang masih aktif serta Indonesia adalah negara yang masih dijejari oleh barisan gunung api yang masih aktif, sehingga Indonesia sering sekali disapa dengan negara yang sangat akrab dengan bencana. Kondisi geografis Negara Indonesia itulah yang merupakan faktor penyebab kerentanan Indonesia terhadap bencana. Adapun kerentanan Indonesia terhadap bencana dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut (Ramli, 2010:4).

1. Faktor Geografis

Wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau-pulau yang tersebar diantara benua Asia dan Australia dan di tengah dua samudera mengakibatkannya rawan terhadap bencana. Pengaruh iklim, badai tropis, dan arus laut akan berpengaruh terhadap kerentanan bencana.

Pantai-pantai yang memanjang sepanjang samudera menjadikan daerah Indonesia rawan terhadap bahaya gelombang pasang dan tsunami.

2. Faktor Geologi

Dari sisi geologi, Indonesia juga merupakan kawasan yang rawan terhadap berbagai bencana. Posisi geografis Indonesia terutama aspek geologi berpengaruh besar. Indonesia tempat bertemunya lempeng Australia, lempeng Asia, lempeng Pasifik, yang masing-masing mempunyai gerakan sendiri dengan arah berbeda dan saling bergeser. Kondisi ini mengakibatkan penumpukan energi yang jika tidak bisa ditahan lagi akan menimbulkan gempa.

3. Faktor Hidrometeorologi

Indonesia terdiri atas pulau-pulau yang dialiri oleh sungai-sungai yang besar dan beraliran deras. Curah hujan di Indonesia sebagai suatu kawasan tropis juga tergolong tinggi, khususnya dimusim penghujan. Kondisi ini menimbulkan kerawanan untuk menimbulkan bahaya banjir, tanah longsor, atau *galodo*.

4. Faktor Demografi

Dari sudut pandang demografi, Indonesia dengan jumlah penduduk sangat besar 230 juta jiwa sangat rawan terhadap dampak suatu bencana. Penduduk Indonesia juga bervariasi mulai dari wilayah padat seperti pulau Jawa sampai ke area yang jarang seperti di Papua dan pulau-pulau terpencil lainnya. Kepadatan penduduk, disatu sisi mengakibatkan potensi kerawanan terhadap bencana sangat tinggi.

5. Faktor Lingkungan Hidup dan Tata Lahan

Faktor demografi juga berpengaruh terhadap aspek lingkungan hidup. Tidak dapat disangkal, sejak dasa warsa terakhir terjadi degradasi lingkungan hidup di berbagai tempat di Indonesia. Hutan mengalami kerusakan, daerah aliran sungai mengalami kerusakan ekologi sehingga banjir terjadi setiap musim hujan.

Permasalahan mengenai bencana yang disebabkan oleh faktor-faktor di atas tentunya akan menimbulkan kerugian-kerugian, entah kerugian berupa korban jiwa maupun kerugian yang berupa kerusakan infrastruktur. Dampak yang akan ditimbulkan oleh bencana tersebut memerlukan pengelolaan dengan baik oleh pemerintah pada tingkat pusat maupun pemerintah pada tingkat daerah, karena permasalahan bencana merupakan suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan-kepentingan publik, seperti halnya yang diungkapkan oleh Pramusinto (2009:129) sebagai berikut.

“Bencana erat kaitannya dengan pembangunan, dimana persoalan mengenai bencana sendiri bukanlah semata-mata persoalan fisik yang menyangkut berapa besaran skala bencana, di mana pusat bencana, berapa kerusakan bangunan yang diakibatkan oleh bencana dan lain-lain. Bencana menyangkut persoalan administrasi publik dan kebijakan publik, karena adanya bencana tersebut mengacu isu-isu sebagai berikut: siapa

saja korbannya, berapa banyak anggaran yang harus dikeluarkan, siapa yang harus bertanggungjawab untuk mengatasi persoalan, bagaimana mekanisme organisasi penanggulangan bencana, siapa dan bagaimana melakukan monitoring kegiatan dan lain-lain.”

Sehingga dalam penanggulangan bencana peran yang dilakukan pemerintah yang menyangkut kebijakan dan administrasi publik sangatlah besar. Bencana alam yang terjadi pada masa dekade ini bukan dilihat dari apa penyebab dari bencananya namun dilihat dari apakah dampak yang ditimbulkannya.

Pada Pasal 1 Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa.

“Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”.

Bencana atau sering disebut dengan *disaster* dalam Bahasa Inggris merupakan sesuatu yang sering diidentikkan dengan kejadian buruk. Bencana merupakan salah satu peristiwa yang tidak dapat terpisahkan dalam sejarah kehidupan manusia. Bencana yang kerap terjadi di Negara Indonesia dengan berbagai bentuk dan macam dari bencana tersebut tentunya berdampak buruk dan merugikan. Dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwasannya Tugas/Tujuan Negara antara lain adalah “*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum*”. Hal-hal mengenai perlindungan rakyat yang menunjukkan perwujudan dari kewajiban pemerintah dalam melindungi rakyat sebagai hak asasi rakyat sehingga menempatkan bahwa penanganan terhadap bencana merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap rakyat dari risiko bencana.

Setiap negara mempunyai tugas dalam mensejahterakan rakyat, salah satunya adalah melalui pemerintahan yang baik. Adapun pemerintahan tersebut selanjutnya disebut dengan *Governance* dan mengandung arti hubungan yang sinergis

dan konstruktif antara negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*). Dalam hal ini adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supermasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat (dalam LAN, 2005:64). Jadi suatu pemerintahan yang baik dapat ditunjukkan melalui sinergitas yang baik pula diantara pemerintah atau negara dengan sektor swasta dan masyarakat. Bagaimana pemerintah mampu menjalin hubungan kerjasama atau kemitraan yang baik dengan dua sektor utama dalam pelaksanaan *Governance*. Kemitraan merupakan salah satu perspektif baru dalam perwujudan *Good Governance*, pemerintah harus membangun adanya kepercayaan untuk mencapai *Good Governace*, tanpa adanya kepercayaan maka pencapaian *Good Governance* akan semakin sulit.

Sedangkan di dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana pada Bab VII dijelaskan mengenai Alokasi dan Peran Pelaku Kegiatan Penanggulangan Bencana. Pada poin B dijelaskan bahwa swasta, lembaga non-pemerintah, maupun lembaga internasional mempunyai peran yang sangat besar dalam penanggulangan bencana terhitung pada saat bencana maupun pasca bencana. Sehingga adanya kemitraan yang terjadi diantara pemerintah dengan lembaga-lembaga non-pemerintah sangat diperlukan dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik melalui upaya Pengurangan Risiko Bencana.

Pengurangan Risiko Bencana (PRB) merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh lembaga pemerintah ataupun lembaga nonpemerintah dalam rangka pengurangan dampak buruk dan kerugian yang terjadi pada saat terjadi bencana maupun pasca terjadinya suatu bencana. Penanggulangan bencana yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga nonpemerintah berwujud kegiatan yang bermacam-macam. Mulai dari bantuan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung yaitu dalam bentuk pelatihan-pelatihan dalam rangka mengurangi risiko

bencana. Sedangkan pengertian tentang Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang disebutkan dalam Perka BNPB No.4 Tahun. 2008 Bab. X bahwa,

“Pengurangan Risiko Bencana adalah sebuah pendekatan sistematis yaitu mengidentifikasi, mengkaji dan mengurangi risiko-risiko bencana, bertujuan untuk mengurangi kerentanan-kerentanan sosial-ekonomi terhadap bencana dan menangani bahaya-bahaya lingkungan maupun bahaya-bahaya lain yang menimbulkan kerentanan.”

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 pasal 6a menyebutkan “pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan” yang menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah. Dalam pasal 4e juga disebutkan bahwa penanggulangan bencana bertujuan untuk “membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta”. Dari bunyi undang-undang tersebut dapat dilihat bahwa dalam rangka penanggulangan bencana bukan hanya dilaksanakan oleh pihak pemerintah saja. Namun diharapkan mampu membangun adanya partisipasi dari berbagai pihak, kemitraan publik dengan lembaga-lembaga non-pemerintah yang mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengurangan risiko bencana, untuk itu diperlukan pula adanya partisipasi masyarakat setempat dalam pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana yang menjadikan tugas pemerintah daerah menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga non-pemerintah agar memberdayakan masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana. Penelitian ini nantinya dilakukan untuk mengetahui terbentuknya pola kemitraan yang terjadi antara Pemerintah Daerah setempat dengan *Non Governmental Organization* (NGO) atau lembaga-lembaga nonpemerintah yang berkecimpung dalam urusan penanggulangan bencana.

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang tergolong mempunyai kondisi wilayah rawan bencana. Kondisi geografi Kabupaten Jember adalah salah satu penyebab mengapa Kabupaten Jember menjadi kabupaten yang rawan bencana. Kabupaten Jember dikelilingi oleh pegunungan-pegunungan sebagai berikut, sebelah utara lereng Hyang Argopuro, sebelah timur lereng Gunung Raung dan selatan adalah pegunungan yang berada di kawasan Taman

Nasional Meru Betiri. Bencana alam yang menimpa Kabupaten Jember terdiri dari berbagai macam bencana, diantaranya banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi dan lain-lain. Berikut merupakan data bencana alam yang pernah terjadi di Kabupaten Jember.

Tabel 1.1 Bencana yang terjadi di Kabupaten Jember

Tanggal	Kejadian	Korban Meninggal	Korban Luka-Luka	Korban Hilang	Korban Menderita	Korban Mengungsi	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Ringan	Fasilitas Pendidikan	Kerusakan Lahan (dalam Ha)
08/12/2003	Banjir	0	0	1	3500	0	13	0	0	45
01/01/2006	Banjir dan Tanah Longsor	92	68	0	0	7644	110	287	0	0
16/02/2005	Puting Beliung	0	0	0	0	0	10	0	0	0
01/03/2004	Banjir	0	0	0	0	0	0	0	0	138
30/01/2009	Banjir	0	0	0	0	3258	2	0	0	500
01/01/2011	Banjir	0	0	0	0	0	0	0	0	44
01/02/2010	Banjir	0	0	0	0	0	0	0	0	65
20/04/2010	Banjir	0	0	0	0	0	0	0	0	8
09/05/2010	Banjir	0	0	0	250	4	0	0	0	2
01/09/2010	Banjir	0	0	0	0	0	0	0	0	6
01/10/2010	Banjir	0	0	0	0	0	0	0	0	2
01/02/2011	Banjir	0	0	0	0	0	0	0	0	13
04/02/2011	Tanah Longsor	0	0	0	0	200	0	0	0	0
01/03/2011	Banjir	0	0	0	0	0	0	0	0	28
04/03/2011	Banjir	0	0	0	0	70	0	0	0	0
01/04/2011	Banjir	0	0	0	0	0	0	0	0	16
13/10/2011	Gempa Bumi	0	0	0	0	0	0	0	1	0
06/01/2012	Banjir	0	0	0	6	0	0	0	0	427
07/03/2012	Banjir	0	0	0	3655	0	0	0	0	0
13/11/1974	Banjir dan Tanah Longsor	30	0	0	0	0	0	0	0	0
23/12/2009	Tanah Longsor	0	0	0	0	60	0	1	0	0
28/10/2007	Puting Beliung	0	0	0	0	0	28	254	1	0
13/10/2008	Puting Beliung	1	1	0	0	17	3	43	1	0
01/12/2005	Banjir	0	0	0	0	0	0	0	0	761
01/12/2008	Banjir	0	0	0	0	0	0	0	0	7
09/01/2009	Banjir	0	0	0	1933	31	14	30	1	47
01/01/2008	Banjir	0	0	0	0	0	0	0	0	45
03/02/2004	Banjir dan Tanah Longsor	1	84	0	135	0	7	22	0	10
26/05/2004	Kecelakaan Transportasi	7	26	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Data diolah dari sumber data bnpb.go.id (yang diakses pada tanggal 30 April 2012, jam 05:31 WIB)

Dari data di atas dapat diketahui Kabupaten Jember adalah kabupaten dengan potensi rawan bencana cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari seberapa sering Kabupaten Jember mengalami bencana alam serta kerugian-kerugian yang diakibatkannya. Dalam rangka penanggulangan bencana, maka sudah seharusnya Pemerintah Kabupaten Jember memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), namun pada kenyataannya Pemerintah Kabupaten Jember sampai pada saat ini belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tersebut. Seperti halnya diungkapkan oleh Bapak Rifendy selaku Seksi Kesejahteraan Korban Bencana dan Sumbangan Sosial di Dinas Sosial menyatakan bahwa,

“Kabupaten Jember belum punya BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), mangkanya dibentuk satlak Kabupaten Jember. Disini elemen yang masuk satlak organisasi SKPD, non pemerintah masuk juga” (sumber: wawancara yang dilakukan pada tanggal 03 November 2011).

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di atas memperkuat alasan bahwa Kabupaten Jember memang belum mempunyai BPBD. Sehingga pemerintah Daerah Kabupaten Jember membentuk satlak-satlak saja. Mengingat bahwa Kabupaten Jember adalah kabupaten yang rawan bencana alam, maka dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti tersebut, dapat diketahui bahwa Kabupaten Jember memiliki penanganan yang kurang maksimal dalam penanggulangan bencana. Pemerintah Kabupaten Jember yang belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) hanya membentuk satlak-satlak yang disusun dan diberikan tugas yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Untuk itu tidak menutup kemungkinan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember menjalin hubungan semacam kerjasama/kemitraan dengan lembaga-lembaga yang dirasa mampu dalam bidang penanggulangan bencana.

Satlak PB Kabupaten Jember menetapkan bahwa 17 dari 31 kecamatan di Kabupaten Jember merupakan wilayah rawan terkena bencana alam. Salah satunya adalah Kecamatan Panti yang pada tanggal 01 Januari 2006 tertimpa bencana alam nasional banjir bandang dan tanah longsor. Adapun kondisi geografis Kecamatan

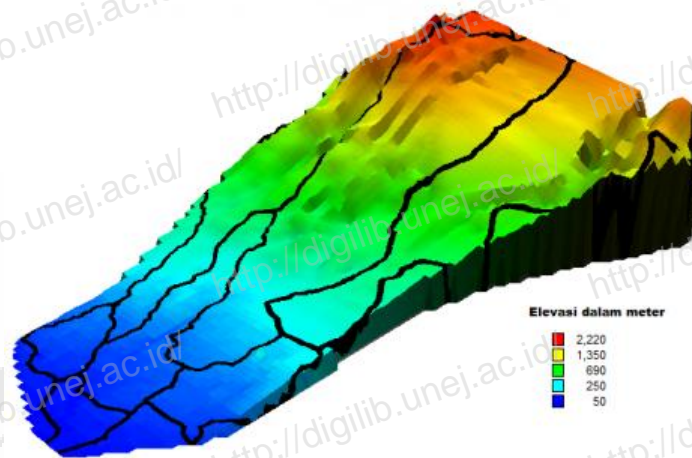
Panti yang diungkapkan dalam <http://askimjatim.wordpress.com/2009/02/02/18/> yang diakses pada tanggal 08 Februari 2012 jam 21:52 WIB adalah sebagai berikut.

“Bagian selatan wilayah Kabupaten Jember adalah dataran rendah. Bagian barat laut berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo adalah pegunungan yang merupakan bagian dari Pegunungan Iyang, dengan puncaknya adalah Gunung Argopuro yang memiliki ketinggian 3.088 m dari permukaan laut. Bagian timur merupakan bagian dari rangkaian Dataran Tinggi Ijen. Kecamatan Panti mempunyai luas wilayah 160,71 km² dengan ketinggian rata-rata 71 m dari atas permukaan laut. Kecamatan Panti terdiri dari 7 desa yaitu Kemuningsari Lor, Glagahwero, Serut, Panti, Pakis, Suci dan Kemiri. Batas Kecamatan Panti yaitu sebelah Utara Kecamatan Bondowoso, sebelah Timur Kecamatan Sukorambi, sebelah selatan Kecamatan Rambipuji dan sebelah barat Kecamatan Bangsalsari. Jumlah penduduk Kecamatan Panti pada tahun 2005 sebanyak 56.419 jiwa terdiri dari 27.599 jiwa laki-laki dan 28.820 jiwa perempuan.

Sedangkan secara morfologi, Kecamatan Panti merupakan daerah perbukitan sebelah selatan-tenggara G. Argopuro dengan ketinggian melandai dari 50 sampai 500 m di atas permukaan laut, dengan tatanan stratigrafi Breksi Argopuro (Qvab) dan Endapan Kipas Argopuro (Qaf) (Sapei, *et. al.*, 1992). Breksi Argopuro merupakan breksi gunung api bersusunan andesit dan bersisipan lava. Breksi andesit berwarna abu-abu dengan masadasar tuf. Sisipan lava terdapat setempat, bersusunan andesit. Satuan ini merupakan hasil kegiatan G. Argopuro yang terakhir. Batuannya sudah sangat lapuk sehingga membentuk laterit yang cukup tebal berwarna merah bata. Endapan Kipas Argopuro (Qaf) merupakan endapan kipas hasil rombakan dari batuan gunungapi Argopuro. Komponen berukuran bongkah, kerakal dan kerikil.”

Kondisi geografis Kecamatan Panti tersebut apabila digambarkan dengan peta topografi ketinggian wilayah, dapat dilihat dalam gambar yang disajikan sebagai berikut.

Gambar 1.1 Topografi Kecamatan Panti berdasarkan ketinggian wilayah



Sumber: <http://askimjatim.wordpress.com/2009/02/02/18/>

Mengingat kondisi geografis dan secara morfologis Kecamatan Panti yang menjadikannya rawan bencana, maka diperlukan adanya penanganan dini terhadap risiko yang mungkin akan timbul akibat terjadinya bencana alam. Bencana banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Panti dan sekitarnya mengakibatkan banyak korban jiwa dan ratusan pemukiman serta infrastruktur yang rusak. Berawal dari guyuran hujan selama dua hari berturut-turut sehingga menyebabkan Lereng selatan Pegunungan Argopuro longsor. Peristiwa tersebut merupakan bencana nasional yang menyebabkan banyak kerusakan dan kerugian-kerugian. Desa yang mengalami kerusakan terparah adalah Desa Kemiri dan Desa Pakis. Desa Kemiri tepat terletak di lereng Pegunungan Argopuro serta merupakan desa yang dialiri Sungai Kali Putih dan Sungai Dinoyo sehingga menyebabkan parahnya kerusakan yang terjadi ketika bencana banjir bandang menyerbu wilayah tersebut. Selain Desa Kemiri, aliran banjir bandang juga mencapai Desa Suci yang letaknya bersebelahan dengan Desa Kemiri, sedangkan Desa Pakis yang juga terletak di bawah Pegunungan Argopuro juga mengalami kerusakan-kerusakan terlebih pemukiman penduduk yang berada disekitar aliran sungai kali pakis. Adapun data mengenai kerugian-kerugian yang diderita

akibat bencana banjir bandang di Kecamatan Panti yang terjadi tepatnya pada tanggal 01 Januari 2006 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.2 Tabel Kerugian Infrastruktur

No.	Infrastruktur Rusak	Jumlah Rusak
1.	Rumah	86 hancur total, 495 rumah terendam lumpur
2.	Pasar	2 kompleks pasar tradisional hancur
3.	Jembatan	5 hancur total
4.	Tanggul	250 meter putus
5.	Bendung Irigasi	11 rusak total
6.	Lahan sawah	370 Ha terendam lumpur

Sedangkan data tentang korban jiwa yang diakibatkan karena banjir bandang di Kecamatan Panti yang terjadi pada tanggal 01 Januari 2006 adalah sebanyak kurang lebih 114 jiwa. (Data diolah dari Sumber Data: PMI, 2010)

Bencana alam yang kerap kali terjadi dan menimpa wilayah-wilayah tertentu di Indonesia bukan saja terjadi akibat dari cuaca, akan tetapi banyak pula faktor-faktor lain yang bukan hanya dari alam. Seperti halnya banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Panti pada awal tahun 2006 disebabkan karena cuaca yang amat buruk serta curah hujan yang cukup tinggi pada saat kejadian bencana banjir tersebut, namun tidak lain juga disebabkan karena kondisi hutan di sekitar Pegunungan Argopuro yang kurang terjaga. Fungsi utama hutan sebagai penampung air di saat hujan turun deras telah hilang karena banyaknya kerusakan-kerusakan hutan. Kurangnya kesadaran masyarakat setempat akan pentingnya menjaga kelestarian hutan juga merupakan salah satu penyebab utama terjadinya banjir bandang yang menimpa Kecamatan Panti tersebut. Begitu juga dengan kurangnya perhatian dan kepedulian dari pemerintah daerah setempat dalam memahami bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah yang rawan bencana. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Suryono selaku Kepala Desa Kemiri dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 07 Juli 2011 bahwa:

“banjir itu terjadi karena hutan di daerah Pegunungan Argopuro mengalami kerusakan, kurangnya kepedulian pemerintah daerah waktu itu pada kondisi dan fungsi utama hutan, masyarakat disekitar Pegunungan Argopuro juga kurang mengerti bahayanya jika kondisi hutan mengalami kerusakan”.

Persoalan bencana alam yang terjadi di Kabupaten Jember khususnya Kecamatan Panti banyak mendapat perhatian, hal tersebut dapat dilihat dari begitu banyaknya lembaga-lembaga pemerintah maupun nonpemerintah yang mengulurkan berbagai macam bantuan yang bermanfaat pasca terjadinya bencana banjir bandang di Kecamatan Panti. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Zaeni selaku Kepala Desa Pakis dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2011 bahwa:

“bantuan yang diberikan secara langsung ya sembako, ada yang dari pemerintah, PMI, Dinsos, alumni-alumni pendidikan, relawan-relawan, dari UNEJ bahkan dari desa sendiri. Ada juga pemberdayaan dari JICA yang kerjasama dengan pemkab, selain penyuluhan sampai juga pada praktik simulasi”

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti melalui wawancara, sampai pada saat ini peneliti dapat mengetahui bahwa pihak-pihak yang menjalin kemitraan dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang dilakukan di Kecamatan Panti adalah Pemerintah Daerah setempat dan *Non Governmental Organization* (NGO) atau lembaga-lembaga nonpemerintah. Adapun lembaga-lembaga tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 1.3 Daftar Pihak-pihak yang Bermitra dalam PRB di Kec. Panti

Pihak yang Bermitra	
Pemerintah	<i>Non Governmental Organization</i> (NGO)
	- <i>Japan International Cooperation Agency</i> (JICA)
- Pemerintah Daerah setempat	- CBDRM (NU)
- Pemerintah tingkat Kecamatan	- Muhammadiyah
- Pemerintah tingkat Desa	- Alam Hutan
	- YLPI
	- Sahabat Alam

Sumber: Data diolah dari sumber data primer hasil wawancara

Adanya peristiwa banjir bandang yang menimpa Kecamatan Panti menjadikan perhatian penting bagi pemerintah daerah maupun pemerintah setempat untuk melakukan beberapa hal salah satunya adalah melakukan kegiatan Pengurangan Risiko Bencana. Adapun kegiatan Pengurangan Risiko Bencana tersebut tentu tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah saja, namun diperlukan adanya kemitraan-kemitraan dengan lembaga-lembaga nonpemerintah atau *NGO* yang berperan dalam usaha Pengurangan Risiko Bencana. Hal tersebut telah dilakukan di Kecamatan Panti semenjak pasca bencana banjir bandang yang menimpa dan dapat diketahui dengan adanya bantuan secara langsung maupun berupa pelatihan-pelatihan beserta praktek simulasi dan kemudian pemasangan alat *early warning system*. Berawal dari itulah kemitraan dalam usaha Pengurangan Risiko Bencana di Kecamatan Panti mulai dilakukan. Pelaksanaan kemitraan di Kecamatan Panti tergolong berhasil ditunjukkan dengan adanya perkembangan masyarakat yang peduli lingkungan dan lebih mengerti tentang bagaimana usaha-usaha yang dilakukan dalam Pengurangan Risiko Bencana. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui perkembangan kemitraan yang terjadi pasca banjir bandang tahun 2006. Sehingga peneliti mengadakan penelitian untuk mengetahui pola kemitraan dimulai sejak tahun 2007 yang dilakukan sampai sekarang di Kecamatan Panti Kabupaten Jember dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana. Karena pada tahun-tahun tersebutlah kegiatan-kegiatan dalam Pengurangan Risiko Bencana dilakukan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Kemitraan Pemerintah Daerah dan *Non Governmental Organization (NGO)* dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Kecamatan Panti Kabupaten Jember.”**

1.2 Rumusan Masalah

Setiap penelitian yang dilakukan dimanapun tentunya berawal dari adanya suatu masalah. Tanpa adanya suatu masalah, maka suatu penelitian tidak akan bisa dilakukan. Lexy Moleong (2008:92) menyatakan bahwa:

”Penelitian jenis apapun titik tolaknya tidak lain bersumber pada masalah. Tanpa masalah penelitian itu tidak dapat dilaksanakan. Masalah itu, sewaktu akan mulai memikirkan suatu penelitian, sudah harus dipikirkan dan dirumuskan secara jelas, sederhana, dan tuntas. Hal itu disebabkan oleh seluruh unsur penelitian lainnya berpangkal pada perumusan masalah tersebut”.

Masalah penelitian adalah pertanyaan yang muncul dalam pikiran peneliti tentang sesuatu gejala atau bagian dari gejala yang belum diketahui jawabannya. Dalam penelitian, kata “*masalah*” tidak berarti sesuatu yang harus dipecahkan, tetapi adalah sesuatu pertanyaan yang ingin diketahui jawabannya. Oleh karena itu, penelitian terbatas pada usaha untuk menemukan jawaban. Sedangkan usaha untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah itu, termasuk “*implikasi*” dari penelitian itu (dalam Kasiram, 2008:60). Rumusan masalah sangatlah penting keberadaannya didalam sebuah penelitian. Hal tersebut dikarenakan supaya terdapat pembatasan atas permasalahan yang akan dipecahkan didalam sebuah penelitian. Sehingga tidak terjadi perluasan dalam pokok bahasan dalam suatu penelitian dan menjadikan pembahasan lebih fokus pada suatu permasalahan utama dalam penelitian. Dengan demikian berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pola kemitraan yang terjadi antara Pemerintah Daerah dengan *Non Governmental Organization (NGO)* dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Kecamatan Panti Kabupaten Jember?”.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan oleh peneliti karena suatu penelitian tentunya mempunyai tujuan, yang mana tujuan penelitian tersebut nantinya akan menjadi suatu arahan atau petunjuk di dalam pelaksanaan suatu penelitian. Kasiram (2008:30) menyebutkan “Tujuan penelitian secara umum ialah untuk menemukan, untuk mengembangkan, maupun koreksi terhadap atau menguji kebenaran ilmu pengetahuan yang telah ada”.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah diatas adalah untuk mengetahui pola kemitraan yang terjadi antara Pemerintah Daerah dengan *Non Governmental Organization (NGO)* dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan atas tujuan dari penelitian ini maka penelitian ini mempunyai beberapa manfaat diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan kedepannya mampu menambah pengetahuan dan memberikan sedikit wawasan bagi pembaca pada umumnya, dan khususnya sebagai pengembangan Ilmu Administrasi Negara.

b. Manfaat Praktis

Memberikan sedikit masukan atau dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berkaitan dan bersangkutan dalam masalah yang berhubungan dengan tema penelitian.

c. Manfaat Pribadi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti sekaligus sebagai pemenuhan tugas akhir dan kewajiban dalam rangka menyelesaikan studi strata 1 pada Program Studi Administrasi Negara di Universitas Jember.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Sebuah penelitian ilmiah, penulis harus mengikuti landasan pemikiran untuk memudahkan perumusan masalah dan merupakan suatu keharusan bahwa di dalam suatu penelitian terdapat penyajian tentang pandangan teoritis yang mendasari pemikiran peneliti. Untuk menjawab suatu permasalahan maka harus didefinisikan terlebih dahulu dengan menggunakan logika dan alur berfikir yang rasional maupun empiris. Pengertian teori menurut Snelbecker yang dikutip oleh Moleong (2008:57) adalah sebagai berikut.

“mendefinisikan teori sebagai seperangkat proporsisi yang berinteraksi secara sintaksi (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis dengan lainnya dengan data atas dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.”

Konsep dalam suatu penelitian mempunyai maksud dan fungsi sebagai penyederhanaan sekaligus memberikan landasan kerangka berfikir untuk membahas dan mengkaji masalah dalam penelitian. Lebih lanjut Singarimbun dan Efendi (2006:33) memberikan pengertian konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian. Maka sesuai dengan konsepsi teori yang dibutuhkan bagi penelitian ini adalah:

1. *Governance*
2. Pemerintah Daerah
3. *Non Governmental Organization* (NGO)
4. Kemitraan Pemerintah Daerah dengan NGO
5. Pengurangan Risiko Bencana

2.1 Governance

Menurut Sumarto (2009:15) *Governance* adalah suatu mekanisme, praktik dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya dan memecahkan masalah-masalah publik. Sedangkan kualitas dari *governance* itu sendiri dinilai dari kualitas interaksi yang terjadi antara komponen *governance* yaitu pemerintah, *civil society* (meliputi organisasi nonpemerintah/LSM, institusi masyarakat di akar rumput, media, institusi pendidikan, asosiasi profesi, organisasi keagamaan, dan lain-lain yang secara keseluruhan dapat menjadi kekuatan penyeimbang dari pemerintah maupun dari sektor swasta) dan sektor swasta, *governance* yang baik memiliki unsur-unsur akuntabilitas, partisipasi, *predictability*, dan transparansi.

Pada hakekatnya *governance* menurut UNDP (dalam LAN, 2004) memiliki tiga kaki yaitu sebagai berikut:

1. *Economic governance*

Meliputi proses-proses pembuatan keputusan (*decision-making process*) yang memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi antara penyelenggara ekonomi. Penyelenggara ekonomi termasuk lembaga legislatif sebagai pengambil keputusan politik, pemerintah disamping sebagai pelaksanaan (BUMN/D) juga sebagai fasilitator terhadap pihak swasta dan masyarakat sebagai pelaku ekonomi.

2. *Political governance*

Merupakan proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan. Aktivitas ini merupakan fungsi legislasi suatu kebijakan tertentu yang dihasilkan oleh badan legislatif dari peraturan perundang-undangan.

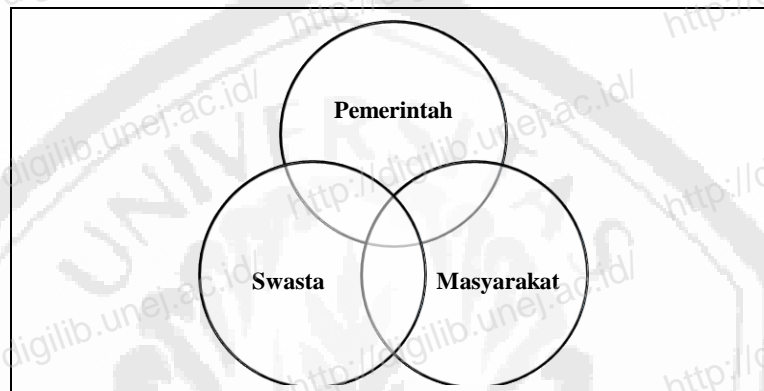
3. *Administrative governance*

Merupakan suatu sistem implementasi kebijakan. Oleh karena itu institusi dari *governance* meliputi tiga domain yaitu *state* (negara atau pemerintahan), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha) dan *society* (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Institusi pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang

kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan masyarakat berperan aktif dan positif dalam interaksi sosial melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi profesi dan lain-lain.

Interaksi antara ketiga domain dalam *governance* dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.1 Interaksi Domain Governance



Sumber: LAN, 2005: 39

Dalam praktek pemerintahan (*Governance*) banyak aktor yang berkecimpung diantaranya individual, organisasi, institusi, dan kelompok-kelompok sosial, yang keberadaannya sangat penting bagi terciptanya pemerintahan yang efektif. Akan tetapi aktor yang dapat diidentifikasi menurut Suhadi dan Fernanda (dalam LAN, 2005: 37) terdapat tiga aktor terpenting yaitu,

1. Negara dan Pemerintahan

Konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani (*Civil Society Organizations*). Pengertian negara (*State*) atau pemerintahan dalam hal ini secara umum mencakup keseluruhan lembaga politik dan sektor publik. Peranan dan tanggung jawab negara atau pemerintah adalah meliputi penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggaraan kekuasaan untuk memerintah, dan membangun lingkungan yang kondusif bagi tercapainya

tujuan pembangunan baik pada level lokal, nasional, maupun internasional dan global.

2. Sektor Swasta

Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan (*manufacturing*), perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk juga kegiatan sektor informal. Peranan sektor swasta sangat penting dalam pola pemerintahan dan pembangunan, karena peranannya sebagai sumber peluang untuk meningkatkan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan, investasi publik, pengembangan usaha, dan pertumbuhan ekonomi;

3. Masyarakat Madani (*Civil Society*)

Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau di tengah-tengah antara Pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi. Kelembagaan masyarakat sipil tersebut pada umumnya dapat dirasakan oleh masyarakat, melalui kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dengan cara mobilisasi.

Berdasarkan uraian di atas mengenai *Governance*, maka dapat disimpulkan secara sederhana bahwasannya *Governance* merupakan salah satu dari sekian banyak tata cara pemerintah yang digunakan untuk mengatur sumber daya yang dimilikinya secara bersama. Adapun *Governance* itu sendiri memiliki tiga pilar utama yaitu, pemerintah (negara/*state*), swasta, dan *civil society*. Ketiga pilar tersebut harus mampu saling bersinergi satu sama lain, mampu menjalankan fungsinya masing-masing dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya milik bersama sehingga bisa memberi manfaat pada semua pihak tanpa ada yang merasa dirugikan.

2.2 Pemerintah Daerah

Sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk menekankan kepada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan peraturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam UU No.32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa,

"Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Pemerintah daerah yang dimaksudkan disini adalah Pemerintah Daerah secara umum yakni Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa. Pemerintah daerah yang disebutkan merupakan pemerintah daerah yang menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur secara keseluruhan mengenai

kepentingan masyarakat berdasarkan Undang-Undang yang sedang berlaku. Adapun pemerintahan dalam tingkat desa yang merupakan bentuk pemerintahan terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia yakni dalam UU No.32 Tahun 2004 mempunyai pengertian sebagai berikut.

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Desa disini merupakan bentuk pemerintahan daerah terkecil yang bertugas mengayomi masyarakat dalam segala hal, termasuk di dalamnya dalam upaya penanggulangan bencana. Pemerintah tingkat desa mempunyai banyak peran dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana, tidak hanya melakukan penyelamatan tetapi juga dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana. Dalam Perka BNPB No.4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa sektor pemerintahan berperan dalam mengendalikan kegiatan pembinaan pembangunan daerah. Selain turun langsung dalam penanggulangan bencana pemerintah daerah setempat berkewajiban mengendalikan serta mengawasi segala sesuatu yang dilakukan dalam rangka penanggulangan bencana maupun kegiatan yang dilakukan pasca terjadinya bencana.

Peran pemerintah pusat maupun daerah dalam penanggulangan bencana yang terjadi sangatlah diperlukan, terlebih begitu banyak lembaga-lembaga nonpemerintah yang turun tangan secara langsung maupun tidak langsung dalam memberikan bantuan. Adapun peran pemerintah tersebut (menurut Setiawan, 2007:80) adalah.

1. Memberikan kemudahan akses bagi siapapun pihak, lembaga bahkan juga individu, agar mereka dapat segera cepat memberikan bantuan atau pertolongan, khususnya ketika tanggap darurat. Kemudahan akses ini diperlukan, khususnya untuk segera dapat memobilisasi berbagai bantuan yang diperlukan pada masa tanggap darurat.

2. Mendata dan memberikan arahan serta 'komando' pada lembaga tersebut, khususnya tentang dimana, jenis, dan besaran bantuan yang harus diberikan oleh para lembaga yang datang ini. Pendataan, arahan, dan komando ini diperlukan agar tidak terjadi kesimpang-siuran proses pemberi bantuan. Kesimpang-siuran ini menyebabkan ketidak-merataan bantuan dan bahkan menyebabkan tidak terlayannya kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Hal ini merupakan sesuatu yang kurang efektif, dan dapat terjadi karena koordinasi dan kesadaran akan peran strategis yang dapat dilakukan pemerintah.
3. Pemerintah harus juga melakukan upaya-upaya sinergi atau kerjasama antara berbagai lembaga yang memberikan bantuan, dimana masing-masing cenderung telah mempunyai preferensi tersendiri tentang bentuk bantuan apa yang akan diberikan. Karena jika tidak diberikan arahan yang jelas, maka yang terjadi adalah in-efisiensi, simpang siuran, dan bahkan konflik. Sehingga tugas pemerintah untuk melakukan koordinasi dan mensinergikan berbagai bantuan dan uluran tangan berbagai pihak ini agar bantuan tersebut dapat seoptimal mungkin membantu korban.
4. Pemerintah seharusnya melakukan kontrol dan monitoring di lapangan atas perilaku dan kinerja berbagai lembaga yang memberikan bantuan tersebut. Hal ini penting agar terdapat jaminan bahwa berbagai program bantuan oleh berbagai pihak tersebut tidak saling tumpang tindih, memenuhi sarat-sarat dan standar-standar lokal dan nasional yang berlaku. Monitoring ini juga diperlukan untuk meminimalisasi konflik dan kemungkinan dampak negatif suatu bantuan.

Hal tersebut juga tertulis dalam UU No. 24 Tahun 2007 BAB.3 Tentang Tanggung Jawab dan Wewenang. Adapun tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

1. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;

3. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
4. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Sedangkan wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

1. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
2. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
3. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
4. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
5. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
6. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang berskala provinsi, kabupaten/kota.

Kabupaten Jember merupakan kabupaten yang sampai pada saat ini belum mempunyai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Jember membentuk Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB) yang diberikan tugas serta kewenangan dalam usaha penanggulangan bencana di Kabupaten Jember. Adapun tugas Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Bupati Jember Nomor. 63 Tahun 2006 adalah sebagai berikut.

- “1. Melakukan kegiatan pelaksanaan upaya Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi sesuai kebijakan BAKORNAS PBP atau petunjuk Gubernur Jawa Timur selaku Ketua SATKORLAK PBP

- Jawa Timur yang meliputi tahap-tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi serta mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan, penyelamatan dan rekonstruksi;
2. a. Melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara langsung;
 - b. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten terdekat dalam penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi;
 - c. Melakukan upaya pencegahan melalui kewaspadaan masyarakat dengan kegiatan-kegiatan penyuluhan, perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kabupaten Jember;
3. Mengkoordinasi dan mengendalikan penerimaan dan penyaluran bantuan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 4. Melaporkan hasil kegiatannya kepada BAKORNAS PBP lewat Gubernur Jawa Timur.”

Sedangkan susunan keanggotaan satuan pelaksana penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi Kabupaten Jember tercantum dalam tabel 2.1 sebagaimana terlampir. Adapun keanggotaan yang tertera dalam Peraturan Bupati Jember No. 63 Tahun 2006 tersebut merupakan pembagian tugas bagi anggota-anggota yang ditunjuk dalam pelaksanaan penanggulangan bencana maupun penanggulangan pengungsi.

2.3 Non Governmental Organization (NGO)

Lembaga atau organisasi nonpemerintah (selanjutnya disebut dengan Ornop) atau yang biasa disebut dengan *Non Governmental Organization (NGO)* merupakan suatu lembaga baik nasional maupun internasional atau lembaga asing yang memiliki tugas serta wewenang masing-masing. Lembaga-lembaga non-pemerintah pada dasarnya memiliki fleksibilitas dan kemampuan yang memadai dalam upaya penanggulangan bencana. Dengan koordinasi yang baik lembaga non-pemerintah ini akan dapat memberikan kontribusi dalam upaya penanggulangan bencana mulai dari tahap sebelum, pada saat dan pasca bencana. Begitu juga dengan Lembaga

Internasional, pemerintah dapat menerima bantuan dari lembaga internasional, baik pada saat pra bencana, saat tanggap darurat maupun pasca bencana. Namun demikian harus mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (dalam Perka BNPB No. 4 Tahun 2008). Dalam PP No. 23 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa,

“Lembaga asing nonpemerintah adalah suatu lembaga internasional yang terorganisasi secara fungsional bebas dari dan tidak mewakili pemerintahan suatu negara atau organisasi internasional yang dibentuk secara terpisah dari suatu negara di mana organisasi itu didirikan.”

Seperti yang telah dikatakan dalam konsep *Governance* bahwa *civil society* meliputi organisasi nonpemerintah/LSM, institusi masyarakat di akar rumput, media, institusi pendidikan, asosiasi profesi, organisasi keagamaan, dan lain-lain yang secara keseluruhan dapat menjadi kekuatan penyeimbang dari pemerintah maupun dari sektor swasta (Sumarto, 2009:15). Dari pengertian singkat tersebut dapat diketahui bahwa LSM/NGO atau organisasi nonpemerintah merupakan suatu organisasi yang sifatnya tidak terikat serta beranggotakan masyarakat sipil. Sedangkan menurut Hikam, 1999:3 menyebutkan bahwa,

“*civil Society* dapat didefinisikan sebagai *wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain: kesukarelaan (voluntaru), keswasembadaan (self-generating), dan keswadayaan (self-supporting), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya*”

NGO yang sering disebut dengan istilah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Meskipun NGO bukan menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara akan tetapi berbagai kegiatan yang dilakukan telah banyak diakui mempunyai banyak nilai positif dalam berperan serta ikut berproses dalam pemerintahan yang baik (*good governance*). (dalam <http://soloraya.net/blog/2009/10/08/peran-humas-dalam-dunia-ngo/> yang

diakses pada tanggal 05 November 2011, pukul 07:27 WIB). Secara garis besar dari sekian banyak organisasi non pemerintah yang ada dapat dikategorikan sebagai berikut.

1. Organisasi donor, adalah organisasi non pemerintah yang memberikan dukungan biaya bagi kegiatan ornop lain.
2. Organisasi mitra pemerintah, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan dengan bermitra dengan pemerintah dalam menjalankan kegiatannya.
3. Organisasi profesional, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan berdasarkan kemampuan profesional tertentu seperti ornop pendidikan, ornop bantuan hukum, ornop jurnalisme, ornop kesehatan, ornop pengembangan ekonomi dll.
4. Organisasi oposisi, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan dengan memilih untuk menjadi penyeimbang dari kebijakan pemerintah. Ornop ini bertindak melakukan kritik dan pengawasan terhadap keberlangsungan kegiatan pemerintah.

Secara garis besar organisasi non pemerintah dapat di lihat dengan ciri sebagai berikut: organisasi ini bukan bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara, dalam melakukan kegiatan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan (nirlaba). Dan kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya untuk kepentingan para anggota seperti yang di lakukan koperasi ataupun organisasi profesi (dalam <http://soloraya.net/blog/2009/10/08/peran-humas-dalam-dunia-ngo/> yang diakses pada tanggal 05 November 2011, pukul 07:27 WIB). Menurut Luthfi dkk (2008:49) bahwa LSM dapat dikategorikan dalam tiga model yaitu,

1. Tipe konformis yang melakukan kerja hanya dengan memperhatikan aspek kariatif yaitu hanya dengan memberikan bantuan;
2. Tipe reformis dengan melakukan pemberian bantuan yang diikuti dengan adanya kerja-kerja pemberdayaan;

3. Tipe transformasi adalah melakukan kerja-kerja dengan pendekatan yang transformatif, mulai dari aspek teologinya hingga aspek praktisnya.

Selain dari pihak NGO atau LSM nasional, penanganan dan penanggulangan bencana juga dapat dilakukan oleh NGO tingkat internasional. Seperti halnya yang tertuang dalam PP No. 23 Tahun 2008 Pasal 12 ayat 4 bahwa.

“Lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berperan serta dalam penanggulangan bencana bersama dengan mitranya di Indonesia, baik dengan instansi/lembaga terkait maupun lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kesamaan visi dan misi”

Lembaga nonpemerintah yang dimaksudkan disini merupakan lembaga nonpemerintah yang terkait dengan penanggualngan bencana seperti yang tertera dalam UU No.23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana Pasal 1 ayat 5 yakni “instansi atau lembaga yang terkait adalah instansi/ lembaga yang terkait dengan penanggualngan bencana”. Jadi lembaga-lembaga asing nonpemerintah yang berperan secara langsung ataupun tidak langsung dalam penanggulangan bencana, diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam memberikan partisipasi dan kerjasamanya dalam penanggulangan bencana saat terjadi maupun saat tidak terjadi bencana.

2.4 Kemitraan Pemerintah Daerah dengan *Non Governmental Organization* (NGO)

Kemitraan (*partnership*) adalah perspektif baru yang merupakan penjabaran dari *good governance*. *Partnership* hanya dapat berlangsung apabila ada *trust* (kepercayaan) antar para pihak yang terlibat. Sehingga pemerintah perlu terlebih dahulu menghilangkan rasa ketidakpercayaan komunitas terhadap dirinya. Karena tanpa itu, maka prospek menuju *good governance* akan sangat sulit dicapai (dalam

Sumarto, 2009:119). Menurut pendapat John Clark (1995:81) yang menyebutkan bahwa,

“Hubungan yang bersahabat antara NGO dengan pemerintah terjadi pada saat NGO membutuhkan pemerintah agar memberi sedikit kelonggaran untuk melakukan pekerjaan pilihannya, tidak mencari pengaruh yang lebih luas dalam hal perencanaan pembangunan dan jika pakerjaannya tidak dihalangi oleh pemerintah. Pemerintah juga merasa tenang menjalin hubungan baik bilamana tidak merasa terancam atau ditentang, dan jika pekerjaan NGO sejalan dengan tujuan-tujuan dari pemerintah”

Adanya hubungan yang terjalin dengan baik antara pemerintah dengan NGO pada hakekatnya membawa keuntungan bagi masing-masing pihak. Melihat dari pendapat John Clark bahwasannya ketika NGO membutuhkan ruang untuk menjalankan program-programnya sementara pelaksanaan program tersebut sama sekali tidak mengancam keberadaan pemerintah, maka pihak pemerintah juga dengan senang hati memberikan ruang bagi NGO selama program yang dilaksanakan juga mendukung perkembangan penyelesaian masalah-masalah publik.

Hubungan sinergis antara masyarakat, pemerintah dan swasta menjadi bagian penting dalam *governance*. Dalam konteks *governance* pemerintah diposisikan sebagai fasilitator atau katalisator, sedangkan tugas untuk pembangunan menjadi tanggung jawab seluruh komponen negara termasuk dunia usaha dan msyarakat. Bentuk ideal relasi yang diwujudkan adalah “kemitraan” antara pemerintah, masyarakat, swasta, organisasi massa, organisasi pollitik, organisasi profesi dan LSM. Dengan demikian konsep *governance* merujuk pada tiga pilar utama, yaitu *public governance*, *corporate governance* dan *civil society* (dalam Sulistiyani, 2004:76). Sedangkan yang dimaksud dengan sinergis dalam perwujudan *Good Governance* menurut LAN, 2000:8 (dalam Widodo, 2001:24) adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga “kesinergian” interaksi yang konstruktif di antara *domain-domain* negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*). Wujud sinergis itu sendiri dapt dilihat dari adanya keseimbangan diantara tiga domain dalam *Good*

Governance itu sendiri. Keberadaan pemerintah, swasta dan masyarakat sangat diperlukan dalam tiap perwujudan *Good Governance*, salah satunya juga dalam pembuatan kebijakan dan dalam hal-hal lain yang berhubungan erat dengan kepentingan bersama.

Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari akar kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu atau kompanyon”. Sedangkan *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

Bertolak dari pengertian tersebut di atas, maka kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Ada dua pihak atau lebih.
2. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan
3. Ada kesepakatan
4. Saling membutuhkan

Tujuan terjadinya suatu kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra. Dengan demikian kemitraan hendaknya memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang bermitra, dan bukan sebaliknya ada suatu pihak yang dirugikan atau merugikan. Untuk terjadinya sebuah kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan serta memperbesar manfaat memerlukan komitmen yang seimbang antara satu dengan lainnya.

Kemitraan dapat dilakukan oleh pihak-pihak perseorangan maupun badan hukum, atau kelompok-kelompok. Adapun pihak-pihak yang bermitra tersebut dapat memiliki status yang setara atau subordinate, memiliki kesamaan misi atau misi berbeda tapi saling mengisi/melengkapi secara fungsional. Dengan

mempertimbangkan permasalahan tersebut, maka berikut ini disampaikan model-model kemitraan.

Model-model kemitraan

1. *pseudo partnership*, atau kemitraan semu.

Kemitraan semu adalah merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara kedua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Ada sesuatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.

2. *mutualism partnership*, atau kemitraan mutualistik.

Kemitraan mutualistik adalah merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal. Berangkat dari pemahaman akan nilai pentingnya melakukan kemitraan, dua agen/organisasi atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda, melakukan kerjasama. Manfaat saling-saling antara pihak-pihak yang bekerjasama dapat diperoleh, sehingga memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya, dan sekaligus saling menunjang satu dengan lain. pemikiran kemitraan demikian ini diadopsi dari pola simbiolisme mutualisme yang terjadi antara kerbau dan burung dalam kehidupan binatang.

3. *conjugation partnership*, atau kemitraan melalui peleburan dan pengembangan.

Kemitraan konjugasi adalah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan “paramecium”. Dua paramecium melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Bertolak dari analogi tersebut maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam

melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan dengan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing (dalam Sulistiyani, 2004:129).

Sedangkan model kemitraan yang lain dikembangkan berdasar atas azas kehidupan organisasi pada umumnya. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan atas fenomena-fenomena hubungan kerjasama antar organisasi (dalam Sulistiyani, 2004:131) adalah sebagai berikut.

1. Subordinate union of partnership

Merupakan kemitraan atas dasar penggabungan dua pihak atau lebih yang berhubungan secara subordinatif. Kemitraan ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain, sehingga hubungan yang tercipta tidak berada pada satu garis yang lurus atau seimbang, akan tetapi berada pada hubungan yang bersifat atas-bawah, kuat-lemah dan mengakibatkan tidak ada *sharing* dan peran atau fungsi yang seimbang.

2. Linear union of partnership

Kemitraan yang dilakukan melalui penggabungan pihak-pihak secara linear atau garis lurus. Dalam kemitraan ini pihak-pihak yang bergabung untuk menjalin kerjasama adalah organisasi atau pihak-pihak yang mempunyai kesamaan secara relatif yaitu berupa tujuan atau misi, volume usaha, status maupun legalitas.

3. Linear collaborative of partnership

Dalam kemitraan berikut ini konteks kemitraan sama sekali tidak membedakan volume, status atau legalitas serta kekuatan para pihak yang bermitra. Akan tetapi menekankan pada visi-misi yang saling mengisi satu dengan lainnya.

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan otonomi daerah, yakni sistem pemerintahan dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengaturan

daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi yang ada. Sedangkan tata pemerintahan yang baik atau biasa disebut dengan Good Governance merupakan cita-cita utama suatu negara dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Begitu juga di Negara Indonesia yang mendambakan adanya tata pemerintahan yang baik pula.

Dalam tata pemerintahan yang baik, maka pemerintah dikatakan sebagai pemerintahan yang baik jika pemerintah mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan menjalin kemitraan (*partnership*) dengan tiga pilar utama yakni pemerintah, masyarakat dan swasta. Terciptanya hubungan yang baik dan kerjasama yang baik akan menuntun pemerintah berjalan dengan baik pula. Bukan hanya pada pelaksanaan pemerintahan daerah secara umum saja, akan tetapi dalam berbagai permasalahan juga diantaranya dalam penanggulangan bencana, mengingat pemerintah memiliki kewajiban dalam memberikan pertahanan dan keamanan bagi warga masyarakatnya.

Dalam UU No. 23 Tahun 2008 Pasal 2 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa:

“Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat”

Penanggulangan bencana tentunya tidak hanya dilakukan oleh pihak pemerintah daerah saja. Karena sudah dapat diketahui bahwa pemerintah daerah tidaklah mampu melakukan kegiatan secara mandiri dalam rangka penanggulangan bencana. Sehingga diperlukan adanya kemitraan antara pemerintah daerah setempat dengan lembaga-lembaga, pihak-pihak nonpemerintah dalam rangka melakukan kegiatan yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan penanggulangan bencana. Seperti yang tertuang dalam UU No.24 Tahun 2007 Pasal 4 disebutkan bahwa penanggulangan bencana mempunyai tujuan sebagai berikut.

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
2. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;

3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
4. Menghargai budaya lokal;
5. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
6. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
7. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tujuan diadakannya penanggulangan bencana seperti yang disebutkan dalam pasal diatas bukan hanya sekedar membantu pihak korban bencana, namun dalam poin 5 dijelaskan bahwa dalam penanggulangan bencana bertujuan pula untuk membangun partisipasi dan kemitraan antara pemerintah daerah dengan pihak publik maupun swasta. Terjalinnnya kemitraan dan kerjasama yang baik akan meningkatkan prioritas penanggulangan bencana secara umum. Masyarakat yang dahulu menyandang gelar sebagai objek dalam penanganan penanggulangan bencana, akan tetapi sekarang masyarakat merupakan subjek yang artinya keikutsertaan masyarakat dalam penanganan bencana sangat diperlukan. Sehingga kemitraan yang dilakukan pemerintah daerah dengan *NGO* lebih mengarah pada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang kemudian masyarakat mampu berpartisipasi dalam penanggulangan bencana ataupun dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana yang dilakukan di wilayah setempat.

2.5 Pengurangan Risiko Bencana

2.5.1 Bencana

Negara Indonesia merupakan negara yang berpotensi terancam bencana. Pengertian bencana menurut Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007 tertulis bahwa.

“Bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.”

Bencana yang kerap menimpa makhluk di bumi tentunya memiliki kategori yang bermacam-macam. Adapun pengelompokan bencana yang disebutkan dalam Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) tahun 2010–2012: 2-1 berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 yaitu,

“mengelompokkan bencana ke dalam bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana nonalam adalah bencana yang disebabkan peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang mengakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan manusia, yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas, dan teror”

Potensi penyebab terjadinya bencana di Negara Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu karena faktor alam, perbuatan manusia, dan sosial (dalam Ramli, 2010:8).

1. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi, letusan gunung api, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.
2. Bencana buatan manusia antara lain berupa kebakaran hutan lahan yang disebabkan ulah manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, dan kegiatan pertambangan. Beberapa contoh bencana non alam di Indonesia adalah peristiwa Lapindo Brantas, Kebakaran tangki di Cilacap, ledakan di Pabrik Kimia Petro Widada Gresik, dan tenggelamnya Kapal Tampomas.

3. Bencana sosial terjadi karena rusak dan kurang harmonisnya hubungan sosial antar anggota masyarakat yang disebabkan berbagai faktor baik sosial, budaya, suku, atau ketimpangan sosial.

Berdasarkan definisi bencana di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bencana merupakan salah satu kejadian yang bisa menimpa setiap makhluk di seluruh dunia. Bencana datang tanpa diduga dan seringkali menyebabkan banyak korban dan kerusakan-kerusakan yang merugikan banyak pihak. Bencana bukan hanya datang dari alam dan disebabkan karena kondisi alam, akan tetapi bencana dapat juga muncul akibat dari perbuatan makhluk di dunia itu sendiri. Keberanekaragaman bencana yang terjadi tentunya memerlukan adanya suatu penataan. Bukan hanya sekedar penataan dalam penanggulangan bencana akan tetapi penataan pasca terjadinya bencana guna mengurangi risiko terjadinya bencana dalam kurun waktu mendatang. Seperti yang tertera dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No.4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Bab I disebutkan bahwa:

“Kompleksitas dari permasalahan bencana tersebut memerlukan suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Penanggulangan yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah- langkah yang sistematis dan terencana, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dan bahkan terdapat langkah upaya yang penting tidak tertangani.”

Permasalahan mengenai bencana beserta penanggulangannya sangatlah memerlukan strategi yang tepat. Hal tersebut dikarenakan apabila terjadi ketidaktepatan sasaran dalam upaya penanggulangan bencana, maka dapat mengaibatkan ancaman baru entah pada sektor bencana itu sendiri atau mungkin pada sektor lain.

2.5.2 Penanggulangan Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 adalah “serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi”. Selanjutnya pada Pasal 31 disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:

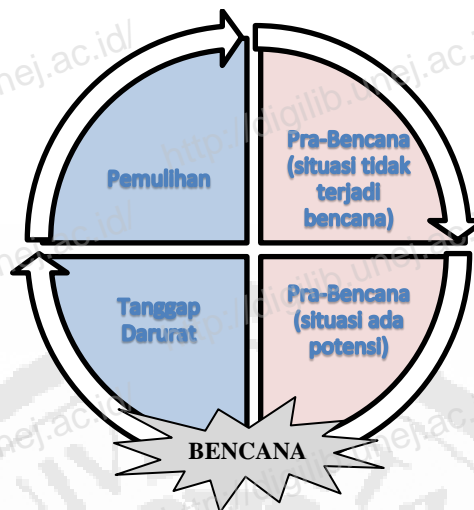
- a. Sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. Kelestarian lingkungan hidup;
- c. Kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. Lingkup luas wilayah.

Kemudian pada Pasal 33 dijelaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. Prabencana;
- b. Saat tanggap darurat; dan
- c. Pascabencana.

Rangkaian kegiatan tersebut apabila digambarkan dalam siklus penanggulangan bencana adalah sebagai berikut.

Gambar 2.2 Siklus Penanggulangan Bencana



Sumber: Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 2 Tahun 2008.

Pada dasarnya penyelenggaraan terdiri dari tiga tahapan yaitu.

1. Pra bencana yang meliputi
 - a. Situasi tidak terjadi bencana
 - b. Situasi terdapat potensi bencana
2. Saat tanggap darurat yang dilakukan dalam situasi terjadi bencana
3. Pascabencana yang dilakukan dalam saat setelah terjadi bencana

Keterangan: Tahapan bencana yang digambarkan di atas, sebaiknya tidak dipahami sebagai suatu pembagian tahapan yang tegas, dimana kegiatan pada tahap tertentu akan berakhir pada saat tahapan berikutnya dimulai. Akan tetapi harus dipahami bahwa setiap waktu semua tahapan dilaksanakan secara bersama-sama dengan porsi kegiatan yang berbeda. Misalnya pada tahap pemulihan, kegiatan utamanya adalah pemulihan tetapi kegiatan pencegahan dan mitigasi juga sudah dimulai untuk mengantisipasi bencana yang akan datang.

Adapun penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam Pasal 34 pada tahapan prabencana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 huruf a meliputi:

- a. Dalam situasi tidak terjadi bencana; dan

- b. Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana pada Pasal 35 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi:

- a. Perencanaan penanggulangan bencana;
- b. Pengurangan risiko bencana;
- c. Pencegahan;
- d. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. Persyaratan analisis risiko bencana;
- f. Penegakan rencana tata ruang;
- g. Pendidikan dan pelatihan; dan
- h. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Hal-hal yang dilakukan dalam penanggulangan bencana pada saat tidak terjadi bencana meliputi berbagai macam kegiatan seperti yang telah tertuang diatas, salah satunya adalah kegiatan Pengurangan Risiko Bencana. Dimana kegiatan Pengurangan Risiko Bencana yang dimaksud akan dijelaskan lebih lanjut pada subsubbab berikut.

2.5.3 Pengurangan Risiko Bencana

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Pasal 37 menyebutkan bahwa "Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana". Kemudian kegiatan-kegiatan yang dimaksud dalam ayat tersebut meliputi,

1. Pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
2. Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
3. Pengembangan budaya sadar bencana;

4. Peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
5. Penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.

Sedangkan pengertian risiko bencana itu sendiri adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Pengurangan Risiko Bencana merupakan upaya yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat dalam rangka meminimalisir dampak buruk yang diakibatkan oleh bencana. Adapun Pengurangan Risiko Bencana (*Disaster risk reduction*) adalah konsep dan praktik mengurangi risiko-risiko bencana melalui upaya-upaya sistematis untuk menganalisis dan mengelola faktor-faktor penyebab bencana, termasuk melalui pengurangan keterpaparan terhadap ancaman bahaya, pengurangan kerentanan penduduk dan harta benda, pengelolaan lahan dan lingkungan secara bijak, dan peningkatan kesiapsiagaan terhadap peristiwa-peristiwa yang merugikan. (<http://fpbibencana.blogspot.com/2009/08/terminologi-dasar-adaptasi-dan.html> yang diakses pada tanggal 22 Maret 2012, Jam 20:14 WIB).

Pengurangan risiko bencana merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi akibat buruk dari bencana yang terjadi. Dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2007 disebutkan bahwa pengurangan risiko bencana dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, dan terutama dilakukan dalam kondisi sedang tidak terjadi bencana. Kemudian dalam Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) tahun 2010-2012, 3-1 disebutkan bahwa:

“Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia merupakan bagian dari upaya pengurangan risiko bencana di tingkat internasional yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat, termasuk masyarakat internasional.”

Pengertian tentang Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang disebutkan dalam Perka BNPB No.4 Tahun. 2008 Bab. X bahwa,

“Pengurangan Risiko Bencana adalah sebuah pendekatan sistematis yaitu mengidentifikasi, mengkaji dan mengurangi risiko-risiko bencana, bertujuan untuk mengurangi kerentanan-kerentanan sosial-ekonomi terhadap bencana dan menangani bahaya-bahaya lingkungan maupun bahaya-bahaya lain yang menimbulkan kerentanan.”

Dalam pengarustamaan pengurangan risiko bencana, ada beberapa perubahan paradigma penting yang perlu dicatat, adapun paradigma tersebut, menurut Pujiono, 2007 (dalam Pramusinto, 2009:131) adalah sebagai berikut.

1. Dari respon darurat menjadi manajemen bencana: penanggulangan bencana tidak dapat lagi memfokuskan diri hanya pada penanggulangan kedaruratan (*emergency response*) pada saat bencana sudah terjadi, melainkan lebih pada pengurangan keseluruhan risiko bencana dari pengamatan risiko, pencegahan, mitigasi, kesiapan, respon, pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi.
2. Dari bencana alam menjadi bencana umum: karakteristik suatu daerah bisa membuatnya rentan terhadap bencana alam. Tetapi juga patut dititik bahwa bahaya dan kejadian bencana yang tidak semata-mata disebabkan oleh alam juga sering terjadi dan menimbulkan dampak yang luar biasa. Oleh karenanya diperlukan perluasan cakupan bahasan menjadi definisi bencana yang lebih umum ketimbang sekedar bencana alam.
3. Dari tindakan kemurahan menjadi pemenuhan hak dasar rakyat: perlindungan rakyat dari dampak bencana bukan lagi sekedar tindakan kemurahan hati pemerintah terhadap rakyatnya, melainkan sebagai tanggungjawab konstitusional negara untuk memenuhi hak dasar rakyat.
4. Dari tanggungjawab pemerintah menjadi tanggungjawab bersama: penanggulangan bencana adalah sedemikian kompleksnya sehingga tidak dapat dibebankan semata-mata kepada pemerintah melainkan menjadi urusan bersama. Bagaimanapun, pada akhirnya pemerintah memegang tanggung jawab terakhir pelaksanaannya.

Pengurangan risiko bencana merupakan hal yang penting dilakukan dalam penanganan bencana. Untuk itu diperlukan adanya strategi yang dirancang secara internasional. Adapun sasaran utama dalam strategi tersebut dalam (RAN-PRB tahun 2010-2012, 3-1) yaitu.

1. Mewujudkan ketahanan masyarakat terhadap dampak bencana alam, teknologi, dan lingkungan;
2. Mengubah pola perlindungan terhadap bencana menjadi manajemen risiko bencana dengan memberlakukan integrasi strategi pengurangan risiko bencana ke dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan.

Pengurangan risiko bencana dilakukan dalam rangka mengurangi atau meminimalisir dampak yang disebabkan oleh terjadinya bencana. Sehingga korban bencana atau sasaran yang akan menjadi korban dalam suatu bencana lebih mampu mengerti dan memahami hal terpenting yang harus mereka lakukan ketika sebelum atau saat bencana itu datang. Kegiatan pengurangan risiko bencana merupakan suatu landasan penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Maka dari itu kegiatan pengurangan risiko bencana dianggap lebih relevan jika disosialisasikan kepada masyarakat yang rentan terhadap risiko bencana. Selain dapat mengurangi banyaknya korban bencana, kegiatan pengurangan risiko bencana juga mampu memotifasi dan memberdayakan masyarakat rentan bencana untuk bersiap siaga dalam menghadapi bencana yang kapanpun dapat terjadi.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sebuah aktivitas menelaah suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara terancang dan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang terandakan kebenarannya mengenai dunia alam atau dunia sosial (menurut Faisal yang dikutip oleh Kasiram, 2008:47). Sebuah penelitian ilmiah yang dilakukan oleh peneliti manapun, tentunya sangat membutuhkan apa yang disebut dengan metode penelitian. Di dalam metode penelitian tersebut terdapat langkah-langkah serta prosedur yang sistematis. Metode penelitian akan menjadi dasar untuk memperoleh data dan menemukan kebenaran ilmiah dalam sebuah penelitian. Metode penelitian sangat membantu dalam mengungkap kebenaran ilmiah, sehingga dapat diuji dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Berdasarkan pengertian metode penelitian diatas maka alur penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian,
2. Fokus Penelitian
3. Lokasi penelitian,
4. Teknik penentuan informan,
5. Teknik pengumpulan data,
6. Teknik analisis data.
7. Teknik pemeriksaan keabsahan data.

3.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang dikaitkan pada topik yang akan diteliti, maka paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Bogdan dan Taylor (disitir oleh Moleong, 2007:4) menyatakan bahwa.

“metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau kata lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.”

Sedangkan menurut Krik dan Miller yang dikutip oleh Moleong (2008:4) penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun peristilahannya.

Sesuai dengan paradigma penelitian kualitatif, maka penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Dimana peneliti akan menemukan dan mendiskripsikan pola kemitraan yang terjadi diantara Pemerintah Daerah dengan NGO dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Proposal penelitian yang disampaikan berbentuk deskriptif yaitu berupa data yang berbentuk kata-kata atau kalimat dan bukan berbentuk gambar maupun angka-angka. Penelitian yang peneliti lakukan benar-benar berberdasarkan fakta pengamatan yang ada di lapangan.

3.2 Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya terdapat fokus penelitian, terutama pada penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2008:93) “Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu *fokus*”. Fokus penelitian digunakan sebagai pembatasan studi, hal tersebut dilakukan agar sebuah penelitian tetap fokus dan tidak terlalu melebar.

Adapun fokus dari penelitian ini adalah pada kemitraan yang terjadi di antara Pemerintah Daerah dengan *Non Governmental Organization (NGO)* dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang dilakukan di Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melaksanakan kegiatan penelitian serta kegiatan-kegiatan lain untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Tentunya lokasi-lokasi yang berhubungan erat dengan penelitian serta lokasi yang mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Adapun lokasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian adalah:

1. Di Kecamatan Panti Kabupaten Jember yang terdiri dari 7 desa yaitu Desa Panti, Glagahwero, Kemungingsari Lor, Pakis, Serut, Suci dan Kemiri (sedangkan desa-desa yang diutamakan adalah desa-desa di Kawasan Kecamatan Panti yang rawan terkena bencana).
2. Lembaga-Lembaga Nonpemerintah yang berperan dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Jember.

3.4 Penentuan Informan

Informan dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan, karena informan adalah orang yang mampu memberikan informasi dalam sebuah penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, seorang informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian (Moleong, 2008:132).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penentuan informan yaitu *purposive sampling*. “*Purposive sampling* adalah teknik sampling yang digunakan

oleh peneliti jika memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya” (Idrus, 2009:96). Sedangkan menurut Hamidi (2010:90) “Purposive sampling ditandai secara khas oleh penggunaan pertimbangan dan upaya yang hati-hati untuk memperoleh sampel yang representatif dengan memasukkan daerah atau kelompok yang dinilai mempunyai kekhasan.”. Jadi menurut Sutrisno Hadi, 1983 (yang dikutip oleh Hamidi, 2010:90) *purposive sampling* sampelnya dapat diperoleh setelah:

1. Ada pengetahuan awal peneliti (*previous knowledge*) tentang responden, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi, mengenal benar keadaan populasinya.
2. Adanya kelompok-kelompok/ wilayah dari populasi (*group, area, cluster*), berdasarkan pengetahuan awal peneliti.
3. Adanya keputusan untuk memilih kelompok/ wilayah kunci (*key group, area, cluster*) tertentu oleh peneliti (sesuai dengan tujuan penelitian). Kelompok ini yang menjadi sampel yang disebut *the typical or best people*, atau *the presumably typical areas or group in the sample*.
4. Dengan demikian ada kelompok yang tidak dipilih walaupun memenuhi kriteria responden, karena dipertimbangkan bukan merupakan yang tipikal menurut pengetahuan peneliti. Tidak semua daerah, grup atau kluster dalam populasi akan diwakili dalam sampel.

Sampai pada saat ini informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bapak Suryono selaku Kepala Desa Kemiri,
2. Bapak Zaeni selaku Kepala Desa Pakis,
3. Beberapa tokoh masyarakat dan warga desa di Kecamatan Panti,
4. Bapak Rifendy selaku Seksi Kesejahteraan Korban Bencana dan Sumbangan Sosial di Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jember,

Peneliti memilih informan tersebut dengan pertimbangan bahwa informan dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan peneliti. Selanjutnya Menurut Bungin (2007:77), terdapat dua cara dalam memperoleh informan penelitian, yaitu,

1. *Snowballing sampling*, yaitu penentuan informan yang digunakan apabila peneliti tak tahu siapa yang memahami informasi objek penelitian, karena itu ia harus melakukan langkah-langkah:

- Peneliti ketika memulai melakukan penelitian dan pengumpulan informasi, ia berupaya menemukan *gatekeeper*, yaitu siapa pun orang yang pertama dapat menerimanya di lokasi objek penelitian yang dapat memberi petunjuk tentang siapa yang dapat diwawancarai atau diobservasi dalam rangka memperoleh informasi tentang objek penelitian.
- *Gatekeeper* bisa pula sekaligus menjadi orang pertama yang diwawancarai, namun kadang *gatekeeper* menunjuk orang lain yang lebih paham tentang objek penelitian.
- Setelah wawancara pertama berakhir, peneliti meminta informan menunjuk orang lain berikutnya yang dapat diwawancarai untuk melengkapi informasi yang sudah diperolehnya.
- Terus-menerus setiap habis wawancara peneliti meminta informan menunjuk informan lain yang dapat diwawancarai pada waktu yang lain.

2. *Key person*. Memperoleh informan dengan cara *key person* digunakan apabila peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan penelitian, sehingga ia membutuhkan *key person* untuk memulai melakukan wawancara atau observasi.

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknik penentuan informan dengan menggunakan teknik *snowballing sampling*. Hal tersebut dikarenakan apabila dirasa penggunaan penentuan informan menggunakan *purposive sampling* dirasa kurang memenuhi, sehingga ada kemungkinan bagi peneliti dalam penambahan informan penelitian dengan menggunakan *snowball sampling* dan berlangsung hingga

peneliti menemukan informan yang dianggap mampu memberikan jawaban akhir dari penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah penting yang harus dilakukan dalam sebuah penelitian dalam rangka memperoleh data yang diperlukan. Menurut Lofland dan Lofland sebagaimana dikutip oleh Moleong (2008:157) “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

a. Pengumpulan Data Primer

1. Interview (wawancara)

Wawancara menurut Moleong (2008:186) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Sedangkan menurut Tanzeh (2009:63),

“ada dua jenis wawancara yang lazim digunakan dalam pengumpulan data, yaitu wawancara berstruktur dan wawancara tak berstruktur. Wawancara berstruktur adalah wawancara yang sebagian besar jenis-jenis pertanyaannya telah ditentukan sebelumnya termasuk urutan yang ditanya dan materi pertanyaannya. Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang tidak secara ketat ditentukan sebelumnya mengenai jenis-jenis pertanyaan, urutan, dan materi pertanyaannya. Materi pertanyaan dapat dikembangkan pada saat berlangsung wawancara dengan menyesuaikan pada kondisi saat itu juga sehingga menjadi lebih fleksibel dan sesuai dengan jenis masalahnya.”

Dari pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa wawancara atau interview merupakan suatu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara berstruktur

dan tak berstruktur, karena dalam pelaksanaan wawancara peneliti akan melakukan wawancara dengan berlandaskan fokus yang dibuat secara terstruktur, namun tidak menutup kemungkinan akan muncul pertanyaan-pertanyaan diluar fokus yang sekiranya perlu diajukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi dari informan. Selain itu peneliti akan melakukan wawancara dengan informan-informan yang dianggap mampu memberikan informasi tentang penanggulangan bencana di Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

2. Obsevasi

Seperti dikemukakan oleh Guba dan Lincoln yang dikutip Moleong (2008:174) mengatakan bahwa pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposisional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data. Melalui metode ini nantinya akan memudahkan peneliti dalam mendeskripsikan subyek penelitiannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi nonpartisipan yaitu peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan usaha Pengurangan Risiko Bencana, melainkan hanya sebagai pengamat kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam usaha Pengurangan Risiko Bencana yang dilakukan di Kecamatan Panti, Kabupaten Jember.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya yaitu data yang telah terbentuk dalam dokumen-dokumen yang diperoleh dari instansi terkait dan sumber-sumber lain yang mendukung. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumentasi. Menurut Guba dan Lincoln yang dikutip Moleong (2008:216) “Dokumen ialah setiap bahan tertulis atau film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik”. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dibutuhkan dengan jalan mencatat dan mempelajari data yang terdapat dilokasi penelitian, berupa surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang terkait dan masih berhubungan dengan permasalahan yang diangkat, serta tentang pendataan lain yang masih berada dalam ruang lingkup permasalahan yang diangkat. Keseluruhannya kemudian dikembangkan sesuai

dengan kebutuhan penyusunan penelitian dengan tidak membatasi jumlah maupun jenis dan sumbernya.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap terakhir dari sebuah penelitian. data dan informasi yang telah diperoleh dalam sebuah penelitian kemudian dinalisis sesuai dengan jenis data yang digunakan dengan rancangan yang tepat. Sebagaimana dikutip Moleong (2008:248), Bogdan dan Biklen menyatakan bahwa:

“Analisis Data Kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.”

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif Miles dan Huberman (yang dikutip oleh Idrus, 2009:147). Model Interaktif ini terdiri dari tiga hal utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berikut merupakan pemaparan masing-masing proses secara selintas.

1. Tahap Pengumpulan Data

Dalam proses analisis data interaktif ini kegiatan yang pertama adalah proses pengumpulan data. Data kualitatif adalah data yang berupa kata-kata, fenomena, foto, sikap, dan perilaku keseharian yang diperoleh peneliti dari hasil observasi mereka dengan menggunakan beberapa teknik seperti observasi, wawancara, dokumentasi dan dengan menggunakan alat bantu yang berupa kamera, *video tape*.

2. Tahap Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan.

3. Display Data

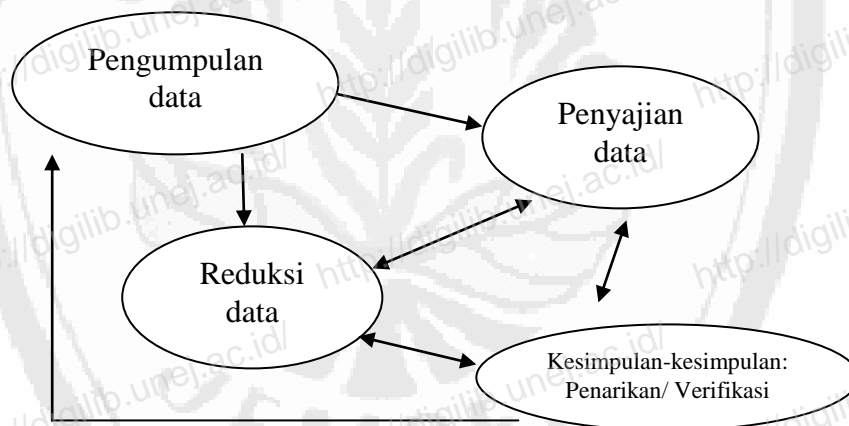
Langkah selanjutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data, yang dimaknai oleh Miles dan Huberman (1992) sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan.

Berikut merupakan gambar proses analisis interaktif Miles dan Huberman

Gambar 3.1 Proses Analisis Interaktif Miles dan Huberman



Sumber: Miles, 1992:20

Metode analisis data interaktif seperti yang telah diungkapkan oleh Miles sangat penting digunakan dalam sebuah penelitian kualitatif. Karena dalam penelitian kualitatif bentuk data yang akan disajikan adalah data yang berbentuk kata-kata dan bukan rangkaian angka-angka. Sehingga diperlukan analisis dimana pada tiap tahapan analisis tersebut seorang peneliti kualitatif harus mampu memilah dan memilih data-data yang perlu disajikan hingga pada tahapan penarikan kesimpulan.

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan sebuah konsep yang penting dalam sebuah penelitian. Teknik pemeriksaan keabsahan data menjadi sesuatu yang sangat penting dalam sebuah penelitian terlebih dalam penelitian dengan jenis data dan analisis kualitatif. Hal tersebut disebabkan karena adanya keraguan dan kemungkinan-kemungkinan perbedaan dalam persepsi oleh peneliti dari sebuah informasi, data maupun hasil analisis data dalam penelitian yang nantinya menyebabkan ketidakmampuan penggambaran masalah di lapangan dengan benar. Dengan teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dalam sebuah penelitian maka upaya penelitian dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. Moleong (2008:320) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keabsahan data adalah setiap keadaan harus memenuhi:

1. Mendemonstrasikan nilai yang benar,
2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan
3. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.

Menurut Moleong (2008:327) kriteria dalam keabsahan data terdiri dari empat jenis yaitu kredibilitas, kepastian, kebergantungan dan kepastian. Sedangkan kredibilitas dibagi menjadi 7 teknik pemeriksaan yaitu.

- a. Perpanjangan keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut memerlukan perpanjangan pada latar penelitian.

- b. Ketekunan pengamatan

Menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

d. Pengecekan sejawat

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat.

e. Kecukupan referensial

Merupakan alat yang digunakan untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi.

f. Kajian kasus negatif

Dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembandingan.

g. Pengecekan anggota

Pengecekan melalui anggota yang terlibat sangat penting dilakukan dan meliputi data, kategori analitis, penafsiran, dan kesimpulan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik keabsahan data Triangulasi. adapun pengertian Triangulasi menurut Moleong (2008: 330),

“Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.”

Peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber dan atau dengan metode. Penggunaan triangulasi dengan sumber ini dimaksudkan bahwa peneliti akan melakukan teknik keabsahan data sesuai dengan informasi yang dapat diperoleh oleh peneliti. Pengecekan keabsahan data triangulasi dengan sumber tersebut berarti

membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan sebagainya. Dalam penelitian kualitatif dikenal istilah data jenuh yang artinya kapan dan di mana pun ditanyakan pada informan, dan pada siapapun pertanyaan sama diajukan, hasil jawaban tetap konsisten sama. Pada saat itulah cukup alasan bagi peneliti untuk menghentikan proses pengumpulan datanya dalam penelitian.



BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian

4.1.1.1 Kabupaten Jember

Kabupaten Jember adalah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak pada ordinat 113°30' - 113°45' BT dan 8°00' - 8°30' LS. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut.

- Sebelah utara : Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Bodowoso
- Sebelah timur : Kabupaten banyuwangi
- Sebelah selatan : Samudra Hindia
- Sebelah barat : Kabupaten Lumajang

Kabupaten Jember memiliki luas wilayah total 3.293,34 Km² dengan ketinggian antara 0 - 3.330 mdpl. Iklim Kabupaten Jember adalah tropis dengan kisaran suhu antara 23°C - 32°C. Bagian selatan wilayah Kabupaten Jember adalah dataran rendah dengan titik terluarnya adalah Pulau Barong. Pada kawasan ini terdapat Taman Nasional Meru Betiri yang berbatasan dengan wilayah administratif kabupaten Banyuwangi. Bagian barat laut berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo adalah pegunungan, bagian dari Pegunungan Hyang, dengan puncaknya Gunung Argopuro (3.088 m). Bagian timur merupakan bagian dari rangkaian Dataran Tinggi Ijen. Kabupaten Jember memiliki beberapa sungai antara lain Sungai Bedadung yang bersumber dari Pegunungan Hyang di bagian Tengah, Sungai Mayang yang bersumber dari Pegunungan Raung di bagian timur, dan Sungai Bondoyudo yang bersumber dari Pegunungan Semeru di bagian barat.

Kabupaten Jember berpenduduk kurang lebih 2.329.929 jiwa (JDA, BPS 2011) dengan kepadatan rata-rata 707,47 jiwa/km². Kabupaten Jember memiliki 31

kecamatan dan dilengkapi sebanyak 244 kelurahan. Berikut dengan sebanyak 201 dusun, serta sebanyak 4.154 Rukun Warga dan 14.714 Rukun Tetangga. Mayoritas penduduk Kabupaten Jember terdiri atas Suku Jawa dan Suku Madura, dan sebagian besar beragama Islam. Selain itu terdapat warga Tionghoa dan Suku Osing. Rata rata penduduk Jember adalah masyarakat pendatang, Suku Madura dominan di Jember bertempat tinggal di daerah utara dan Suku Jawa bertempat tinggal di daerah selatan dan pesisir pantai. Bahasa Jawa dan Madura digunakan di banyak tempat, sehingga umum bagi masyarakat di Jember menguasai dua bahasa daerah tersebut dan juga saling pengaruh tersebut memunculkan beberapa ungkapan khas Jember. Percampuran kedua kebudayaan Jawa dan Madura di Kabupaten Jember melahirkan satu kebudayaan baru yang bernama budaya Pendalungan. Masyarakat Pendalungan di Jember mempunyai karakteristik yang unik sebagai hasil dari penetrasi kedua budaya tersebut. Kesenian Can Macanan Kaduk merupakan satu hasil budaya masyarakat Pendalungan yang masih bertahan sampai sekarang di kabupaten Jember

4.1.1.2 Kecamatan Panti

Secara keseluruhan Kecamatan Panti mempunyai total luas wilayah 160,71 km² dengan ketinggian rata-rata 71 m dari atas permukaan laut. Kecamatan Panti terdiri dari 7 desa dengan letak pusat ibukota wilayahnya di Desa Glagahwero, berikut adalah desa-desa di Kecamatan Panti.

- Desa Kemuningsari Lor
- Desa Glagahwero
- Desa Serut
- Desa Panti
- Desa Pakis
- Desa Suci
- Desa Kemiri.

Sedangkan batas wilayah Kecamatan Panti yaitu,

Sebelah Utara : Kecamatan Bondowoso
Sebelah Timur : Kecamatan Sukorambi
Sebelah Selatan : Kecamatan Rambipuji
Sebelah Barat : Kecamatan Bangsalsari

Jumlah penduduk Kecamatan Panti kurang lebih sebanyak 56.419 jiwa yang terdiri dari 27.599 jiwa laki-laki dan 28.820 jiwa perempuan. Sebagian besar penduduk di Kecamatan Panti adalah bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Hal tersebut dikarenakan luasnya area persawahan serta hutan di Pegunungan Argopuro yang terletak di Kecamatan Panti tersebut.

4.1.1.3 Desa Kemuningsari Lor

Desa Kemuningsari Lor merupakan salah satu desa di Kecamatan Panti yang terletak diantara Desa Glagahwero dan Desa Pakis. Secara umum Desa Kemuningsari Lor memiliki batas-batas administratif sebagai berikut.

Utara : Desa Pakis
Timur : Desa Glagahwero dan Desa Panti
Selatan : Desa Gugut
Barat : Desa Bangsalsari

Desa Kemuningsari Lor memiliki total luas wilayah sebesar 113.148,427 Ha. Berdasarkan penggunaannya Desa Kemuningsari Lor dibagi menjadi lahan pemukiman, persawahan, perkebunan, kuburan, pekarangan, taman, perkantoran dan lainnya dengan rincian luas wilayah sebagai berikut.

Pemukiman : 54.215 Ha
Persawahan : 358 Ha
Perkebunan : 11.200 Ha

Kuburan	: 0,817 Ha
Pekarangan	: 47.363 Ha
Taman	: -
Perkantoran	: 0,083 Ha
Prasarana umum lainnya	: 11,527 Ha

Jumlah penduduk Desa Kemuningsari Lor total sebanyak 6.440 jiwa. Adapun rincian menurut jenis kelamin penduduk Desa Kemuningsari Lor adalah sebagai berikut.

Laki-laki	: 3.165 jiwa
Perempuan	: 3.275 jiwa
Jumlah KK	: 1.826 KK

Penduduk Desa Kemuningsari Lor terdiri dari dua suku yang mendominasi yakni suku Jawa dan suku Madura. Akan tetapi penduduk bersuku Jawa lebih banyak dibandingkan dengan penduduk bersuku Madura. Adapun penduduk bersuku Jawa di Desa Kemuningsari Lor adalah sebanyak 2261 orang laki-laki dan 2398 orang perempuan. Sedangkan penduduk Desa Kemuningsari Lor yang bersuku Madura adalah sebanyak 904 orang laki-laki dan sebanyak 877 orang perempuan.

Penduduk Desa Kemuningsari Lor rata-rata bermatapencaharian sebagai buruh tani dan buruh ternak. Sebagian kecil dari mereka memiliki usaha tani dan ternak sendiri. Akan tetapi lebih mendominasi sebagai buruh tani maupun buruh ternaknya. Tingkat pendidikan penduduk Desa Kemuningsari Lor sudah berkembang dengan baik. Rata-rata dari mereka sudah sadar akan pentingnya pendidikan. Sehingga sebagian besar dari Penduduk Desa Kemuningsari Lor sudah mengenyam pendidikan sampai pada tingkatan SMU.

4.1.1.4 Desa Glagahwero

Desa Glagahwero merupakan letak wilayah dari Ibu Kota Kecamatan Panti yang memiliki luas wilayah 1.086.975 Ha/m². Secara umum batas-batas administrasi Desa Glagahwero adalah sebagai berikut.

Utara	: Desa Panti
Timur	: Desa Jubung
Selatan	: Desa Rambigundam
Barat	: Desa Kemuningsarilor

Penduduk Desa Glagahwero terdiri dari dua suku bangsa yaitu suku jawa dan madura, akan tetapi mayoritas adalah suku madura. Sebagian besar penduduk Desa Glagahwero bermatapencarian sebagai petani, mengingat potensi desa tersebut adalah luasnya area persawahan. Total jumlah penduduk Desa Glagahwero adalah 4.768 dan tingkat kepadatan penduduk 217 per km². Sedangkan rincian jumlah penduduk Desa Glagahwero adalah sebagai berikut.

Laki-laki	: 2.307 jiwa
Perempuan	: 2.461 jiwa
Jumlah KK	: 1.407 KK

Desa Glagahwero merupakan desa yang berpotensi rawan bencana alam, hal tersebut dilihat dari lokasi persawahan yang luas di pinggiran Sungai Bendo. Sawah-sawah dan perumahan penduduk di wilayah tersebutlah yang tersapu bersih oleh aliran sungai Bendo ketika terjadi bencana alam banjir bandang di Kecamatan Panti.

4.1.1.5 Desa Serut

Desa Serut adalah sebuah desa di Kecamatan Panti yang berada pada ketinggian 161 m² dari permukaan laut, dengan suhu rata-rata 35 derajat Celcius, dengan batas wilayah sebagai berikut.

Utara	: Desa Suci dan Desa Kemiri
Timur	: Desa Sukorambi dan Dukuh Mencek
Selatan	: Desa Dukuh Mencek dan Panti
Barat	: Desa Panti dan Suci

Luas total wilayah Desa Serut adalah 1.000,67 Ha. Berdasarkan penggunaannya Desa Serut dibagi menjadi lahan sawah, tanah negara, tanah kering, kuburan dan lainnya dengan rincian luas wilayah sebagai berikut.

Sawah	: 452 Ha
Tanah Negara	: 150 Ha
Tanah Kering	: 378 Ha
Kuburan, jalan dll	: 20,671 Ha

Sedangkan pembagian wilayah Desa Serut terdiri dari 6 dusun yaitu Dusun Krajan, Dusun Karanganom, Dusun Kasian, Dusun Badean Kulon, Dusun Badean Wetan, dan Dusun Mencek yang terdiri dari total 19 RW, 87 RT. Adapun rincian masing-masing RW dan RT tiap dusun adalah sebagai berikut.

1. Dusun Krajan : 4 RW, 18 RT
2. Dusun Karanganom : 2 RW, 11 RT
3. Dusun Kasian : 4 RW, 16 RT
4. Dusun Badean Kulon : 3 RW, 14 RT
5. Dusun Badean Wetan : 2 RW, 12 RT
6. Dusun Mencek : 4 RW, 16 RT

Jumlah Penduduk Desa serut total sebanyak 11.796 jiwa yang terdiri dari;

- Laki-laki : 5.769 jiwa
- Perempuan : 6.027 jiwa

Sebagian besar penduduk Desa Serut adalah bekerja sebagai petani. Beberapa bagian lainnya bekerja sebagai buruh bangunan.

4.1.1.6 Desa Panti

Desa Panti merupakan salah satu desa di Kecamatan Panti yang terletak bersebelahan dengan Desa Glagahwero. Letak Desa Panti tidak jauh dari lokasi Kantor Kecamatan Panti. Secara umum Desa Panti memiliki batas-batas administratif sebagai berikut.

Utara	: Desa Suci
Timur	: Desa Serut
Selatan	: Desa Glagahwero
Barat	: Desa Kemuningsari Lor

Desa Panti memiliki total luas wilayah sebesar 65.555 Ha. Berdasarkan penggunaannya Desa Panti dibagi menjadi lahan pemukiman, persawahan, perkebunan, kuburan, pekarangan, taman, perkantoran dan lainnya dengan rincian luas wilayah sebagai berikut.

Pemukiman	: 4.451 Ha
Persawahan	: 5.349 Ha
Perkebunan	: 48.140 Ha
Kuburan	: 3,5 Ha
Pekarangan	: 3.161 Ha
Taman	: -
Perkantoran	: 1,3 Ha
Prasarana umum lainnya	: 4.450 Ha

Jumlah Penduduk Desa Panti total sebanyak 10.195 jiwa dengan mayoritas bersuku bangsa jawa dan madura. Akan tetapi suku madura lebih mendominasi daripada suku jawa. Berikut rincian penduduk Desa Panti menurut pembagian jenis kelamin,

Laki-laki	: 5.004 jiwa
Perempuan	: 5.191 jiwa

Jumlah KK : 2.906KK

Penduduk Desa Panti sebagian besar bekerja sebagai petani dan buruh tani, namun sudah banyak pula penduduk Desa Panti yang bekerja sebagai PNS. Letak Desa Panti yang tidak jauh dari ibukota wilayah Kecamatan Panti yaitu Desa Glagahwero menjadikan Desa Panti memiliki akses transportasi yang mudah dijangkau. Tidak pula beda halnya dengan desa-desa yang lain di Kecamatan Panti bahwasannya kawasan-kawasan di Desa Panti juga tergolong rawan bencana alam.

4.1.1.7 Desa Pakis

Desa Pakis merupakan desa di Kecamatan Panti yang terletak tepat setelah Desa Kemuningsari Lor. Secara keseluruhan Desa Pakis memiliki luas wilayah total 25.711.236 Ha dengan tingkat kesuburan tanah yang dapat dikategorikan subur. Adapun batas-batas administrasi dari Desa Pakis adalah sebagai berikut.

Utara : Gunung Argopuro
 Timur : Desa Suci
 Selatan : Desa Kemungingsari Lor
 Barat : Desa Badean

Penduduk Desa Pakis sebagian besar bermatapencaharian petani atau buruh tani. Jumlah penduduk Desa Pakis sebanyak 7.421 jiwa dengan rincian sebagai berikut.

Laki-laki : 3.621 jiwa
 Perempuan : 3.800 jiwa
 Jumlah KK : 2.095KK

Desa Pakis merupakan desa di Kecamatan Panti yang berpotensi sebagai penghasil kopi. Perkebunan yang ada di Desa Pakis tersebut merupakan perkebunan milik penduduk setempat. Akan tetapi adapula yang dimiliki oleh pihak swasta serta

pemerintah yang mana penduduk setempat pula yang turut serta mengelola dan bekerja diperkebunan tersebut.

Meningat lokasi Desa Pakis yang berada di kawasan landai Pegunungan Argopuro, maka Desa Pakis juga berpotensi terhadap hasil hutan. Selain itu tentu Desa Pakis merupakan desa yang tergolong rawan bencana alam. Bahkan beberapa kali desa tersebut mengalami bencana alam sepanjang musim penghujan tiba.

4.1.1.8 Desa Suci

Secara umum letak geografis Desa Suci terletak pada wilayah dataran sedang yang luas yang merupakan lembah yang subur. Secara umum batas-batas administrasi Desa Suci meliputi,

Utara	: Pegunungan Argopuro
Timur	: Desa Serut + Desa Kemiri
Selatan	: Desa Panti
Barat	: Desa Pakis

Desa Suci memiliki luas wilayah 508.403 Ha. Dari segi topografi, Desa Suci berada pada bagian selatan wilayah Kabupaten Jember yang merupakan daerah pertanian yang subur untuk pengembangan tanaman pangan. Adapun rincian luas wilayah Desa Suci tersebut terbagi menjadi beberapa kawasan yakni,

Persawahan	: 372.775 Ha
Tegal	: 54.983 Ha
Tanah desa	: 41.193 Ha
Kuburan	: 1.332 Ha
Sekolahan	: 3.307 Ha
Perkebunan	: 34.813 Ha

Selain itu Desa Suci memiliki wilayah berupa dusun-dusun yakni,

- | | | |
|---------------------|-----|------|
| 1. Dusun Glundengan | 5RW | 24RT |
| 2. Dusun Glengseran | 7RW | 24RT |
| 3. Dusun Gaplek | 6RW | 23RT |

Secara umum Desa Suci mayoritas penduduknya merupakan penduduk asli dan sisanya sebagian kecil merupakan penduduk pendatang. Dari penyebaran penduduk yang ada di Desa Suci, maka penyebaran suku bangsa di Desa Suci terdapat dua suku yaitu Suku Jawa dan Madura serta sebagian kecil suku yang lain. Adapun jumlah penduduk Desa Suci sebesar 10.064 jiwa yang terdiri dari,

Laki-laki	: 4.851 jiwa
Perempuan	: 5.156 jiwa
Jumlah KK	: 2.868 KK

Desa Suci dikenal sebagai desa agraris, memiliki potensi alam yang cukup prospektif bagi pengembangan perekonomian wilayah ditingkat desa. Sesuai dengan potensi ekonomi desa yang ada, maka perekonomian di Desa Suci masih mengendalikan pada sektor pertanian sebagai basis dan penggerak roda perekonomian wilayah. Pertanian sebagai sektor unggulan sampai saat ini masih memiliki peran yang dominan dan strategis bagi pembangunan perekonomian baik sebagai penyedia bahan pangan, bahan baku pokok olahan, peningkatan pendapatan desa dan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan. Sedangkan sumberdaya yang ada dan menjadi potensi ekonomi yang unggul adalah dibidang pertanian dengan beberapa produk meliputi padi, jagung, kedelai, ubi, kacang panjang, kacang tanah, mangga, rambutan, dan tanaman palawija lainnya.

Desa Suci merupakan desa yang berpotensi rawan terhadap bencana alam terutama banjir bandang. Sehingga harus selalu diwaspadai mengingat hutan di daerah Gunung Argopuro gundul diakibatkan penebangan liar. Meskipun letak Desa Suci secara geografis tidak berada tepat di kawasan Pegunungan Argopuro akan

tetapi apabila musim penghujan tiba, maka daerah-daerah di Desa Suci ini juga rentan terhadap bencana alam.

4.1.1.9 Desa Kemiri

Desa Kemiri merupakan desa di Kecamatan Panti yang terletak tepat di lereng Pegunungan Argopuro. Secara umum Desa Kemiri memiliki batas-batas wilayah administratif sebagai berikut.

Utara	: Pegunungan Argopuro
Timur	: Desa Sukorambi
Selatan	: Desa Serut dan Desa Suci
Barat	: Desa Suci

Adapun total luas wilayah Desa Kemiri adalah 1.578.584 Ha. Berdasarkan penggunaannya Desa Kemiri dibagi menjadi lahan persawahan, pemukiman dan pekarangan, tegalan, kuburan dan perkebunan dengan rincian luas wilayah sebagai berikut.

Persawahan	: 290.548 Ha
Pemukiman dan Pekarangan	: 142.500 Ha
Tegalan	: 94.000 Ha
Kuburan	: 1.500 Ha
Perkebunan	: 1.050 Ha

Sebagian besar penduduk di Desa Kemiri merupakan penduduk bersuku madura dan suku jawa. Jumlah penduduk Desa Kemiri total sebanyak 8.807 jiwa dengan rincian menurut jenis kelamin sebagai berikut.

Laki-laki	: 4.139 jiwa
Perempuan	: 4.468 jiwa
Jumlah KK	: 2.440 KK

Sebagian besar penduduk di Desa Kemiri bekerja sebagai buruh di perkebunan. Beberapa bagian penduduk juga bekerja sebagai buruh tani dan peternak. Tingkat pendidikan di Desa Kemiri sudah mengalami perkembangan. Sebagian besar penduduk sudah sadar akan pentingnya pendidikan, sehingga sebagian besar dari mereka sudah megenyam pendidikan sampai pada tingkatan SMA.

Desa Kemiri merupakan salah satu desa di Kecamatan Panti yang paling berpotensi terkena bencana alam banjir bandang. Desa Kemiri adalah desa yang pada saat bencana alam banjir bandang yang terjadi pada Tahun 2006 menjadi desa dengan kondisi kerusakan terparah dan korban meninggal terbanyak. Mengingat letak Desa Kemiri yang sangat berdekatan bahkan tepat pada lereng Pegunungan Argopuro, sehingga menyebabkan Desa Kemiri menjadi sasaran utama bencana banjir bandang yang terjadi pada saat itu.

4.1.2 Kronologi Bencana Banjir Bandang di Kecamatan Panti

Kabupaten Jember merupakan salah satu dari sekian banyak kabupaten di Jawa Timur yang berpotensi bencana alam. Sebanyak 17 dari total 31 kecamatan di Kabupaten Jember tergolong rawan bencana dan salah satunya adalah Kecamatan Panti. Pada tanggal 01 Januari 2006 Kecamatan Panti mengalami bencana nasional banjir bandang yang mengakibatkan banyak korban meninggal dunia beserta kerugian-kerugian yang lain. Kecamatan Panti terdiri dari 7 desa yakni Desa Glagahwero, Desa Kemuningsari Lor, Desa Pakis, Desa Panti, Desa Serut, Desa Suci dan Desa Kemiri. Ketujuh desa tersebut terkena bencana banjir bandang. Akan tetapi kondisi terparah berada di Desa Kemiri, karena korban meninggal semua berasal dari Desa Kemiri. Untuk mengetahui bagaimana kronologi banjir bandang yang terjadi di Kecamatan panti tersebut, maka peneliti mengajukan pertanyaan kepada Bapak Suryono selaku Kepala Desa Kemiri yaitu, “Bagaimana cerita singkat banjir bandang

yang menimpa Kecamatan Panti Pak?”. Kemudian beliau menjawab pertanyaan peneliti sebagai berikut.

“Berawal dari kejadian bencana tanah longsor yang terjadi pada tanggal 01 Januari tahun 2006 yang menimpa Desa Kemiri, Suci dan sekitarnya. Bencana tersebut terjadi tidak lain karena kurangnya kesadaran masyarakat dan pemerintah setempat memahami akan pentingnya merawat hutan. Kesadaran masyarakat baru muncul setelah terjadinya bencana.”(sumber: wawancara yang dilakukan pada Tanggal 07 Juli 2011)

Berdasarkan jawaban informan dalam wawancara yang peneliti lakukan tersebut dapat diketahui bahwa penyebab banjir bandang di Kecamatan Panti tidak lain karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti penting merawat kelestarian hutan. Mengingat wilayah Panti tersebut merupakan wilayah yang dominan dengan hutan di Pegunungan Argopuro. Selain itu disebabkan oleh kurangnya pemahaman pemerintah akan pentingnya menghimbau masyarakat wilayah tersebut untuk menjaga kelestarian hutan. Sedangkan kronologi kejadian bencana menurut Dinas Pekerjaan Umum, Provinsi Jawa Timur, 2006 (dalam buku “Mengenal Bencana Banjir Bandang di Indonesia”) adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1 Kronologi Kejadian Bencana

KET	WAKTU KEJADIAN		KECAMATAN DAN DESA YANG TERKENA DAMPAK BENCANA						
	Ke-1	Ke-2	PANTI	Rambupuji	Sukorambi	Sukowidi	Kencong	Kaliwates	Tanggul
HARI	Sabtu Paing	Minggu Pon							
TGL	31 Des 2005	01 Jan 2006	Ds. Panti Ds. Kemiri						
PUKUL	Mulai 17.00 WIB	Mulai 17.00 WIB	Ds. Suci Ds. Pakis Ds. Serut	Ds. Rambigundam Ds. Gugut	Ds. Sukorambi	Ds. Sukowidi	Ds. Wingin Agung	Ds. Sempusari	
Intensitas Hujan	108 mm	178mm	Ds. Glagahwero						
Durasi Hujan	10 jam	10 jam							

Sumber: Data diolah dari sumber data JICA (Buku dengan judul “Mengenal Bencana Banjir Bandang di Indonesia”)

Adapun fenomena kejadian banjir bandang di Sub DAS Denoyo secara kronologis adalah sebagai berikut.

- Curah hujan dengan intensitas tinggi selama 12 hari berturut-turut di Sub DAS Denoyo sebelum kejadian banjir bandang sebesar 501mm, dengan hujan paling deras terjadi pada tanggal 1 Januari 2006 sebesar 107mm, sedangkan di pos pengamatan Kali Jompo tercatat sebesar 216mm.
- Akibat curah hujan dengan intensitas tinggi dan berlangsung dalam jangka waktu lama tersebut, massa tanah yang umumnya tersusun dari batuan penyusun yang lapuk dengan lapisan tanah penutup yang tebal pada tebing sungai yang tinggi dan terjal menjadi jenuh air.
- Kejenuhan massa tanah tersebut mengakibatkan runtuhnya tebing ke arah alur sungai berdimensi besar dengan tebal 5-30m, tinggi 100-200m dan panjang 50-200m. Akumulasi material hasil runtuhnya tebing pada alur sungai, menyebabkan terbentuknya bendung alam dalam volume besar di beberapa tempat.
- Topografi lereng G. Argopuro bagian atas mempunyai kemiringan lereng yang terjal > 45 derajat, sehingga mempercepat aliran air yang menuju lembah sungai. Lembah-lembah sungai cukup curam dan dalam sehingga menyebabkan kecepatan air maksimum.
- Curah hujan yang sangat tinggi dalam kurun waktu beberapa hari berturut-turut menyebabkan struktur tanah menjadi jenuh. Tanah yang jenuh ini mudah sekali tertoreh dan mengakibatkan bahan rombakan lain (debris) baik berupa sedimen dengan berbagai ukuran (sampai batu diameter >5 meter) dan batang-batang kayu tercabut dan selanjutnya terangkut masuk kedalam palung sungai. Kondisi inilah yang memporakporandakan dusun-dusun Kemiri, Suci, Delima, Gunung Pasang dan lain-lain termasuk fasilitas umum berupa jalan, jembatan, gedung-gedung sekolah, bendung-bendung serta saluran irigasi.
- Vegetasi tanaman perkebunan ini pada umumnya berada pada lereng-lereng yang rawan longsor. Tanaman struktur perakarannya lemah, dan tidak cukup kuat mengikat butir tanah. Perubahan tata guna lahan menjadi kebun akan mempercepat aliran air permukaan ke bawah dan memicu terangkutnya debris.

- Jenis tanah di daerah bencana terdiri dari tanah regosol atau andosol yang sangat peka terhadap erosi. Tebal pelapukan >20 meter. Dasar sungai dan batuan dasar tebing sungai di daerah hulu terdiri dari batu-batu dengan diameter cukup besar (1-8meter).

Kemungkinan penyebab banjir bandang di Kecamatan Panti adalah sebagai berikut. Bencana aliran debris bercampur lumpur dan rombakan lainnya yang dikenal oleh masyarakat sebagai banjir bandang telah terjadi pada tanggal 1 Januari 2006 di K.Putih dan K.Dinoyo. Daerah bencana meliputi Kecamatan Panti di daerah hulu dan Kecamatan Rambipuji di daerah hilirnya. Banjir bandang tersebut telah meluluhlantahkan pemukiman penduduk, menewaskan puluhan orang, puluhan orang lainnya luka-luka, dan ribuan orang kehilangan tempat tinggal di barak pengungsian. Di sektor pertanian, ratusan hektar sawah tertutup lumpur dan bendung serta saluran irigasi tidak berfungsi sehingga ratusan hektar sawah terancam kekeringan.

K.Putih dan K.Dinoyo merupakan sungai utama yang mengalir melalui Kecamatan Panti dan Rambipuji. K.Putih mempunyai panjang sungai 17,25km dan luas DAS 12,97km². Sedangkan K.Dinoyo mempunyai panjang sungai 8,12km dan luas DAS 2,7km². Struktur tanah yang gembur dengan luas hutan yang hanya 16% dan sebagian besar wilayahnya mempunyai kemiringan rata-rata 15 derajat, sangat rentan terhadap bahaya longsor tebing.

Kondisi pasca banjir bandang di Jember, Jawa Timur telah mengakibatkan kerugian yang sangat parah. Menurut data antara Dinas PU Pengairan, Posko maupun SATLAK jumlah korban jiwa di atas 100 jiwa. Kerusakan infrastruktur antara lain rumah, pasar, jembatan, tanggul, bendung, saluran irigasi dan persawahan. Berikut merupakan jumlah pengungsi pada masing-masing tempat pengungsian pada saat banjir bandang di Kecamatan Panti.

Tabel 4.2 Jumlah Korban dan Pengungsi Per 6 Januari 2006

NO	ASAL PENGUNGGSI	JUMLAH (JIWA)
1	Dsn. Tenggililing, Kemiri	1800
2	Dsn. Kasiyan, Serut	400
3	Kyai Suhadi, Serut	300
4	Masjid Pertigaan, Suci	50
5	Dsn. Sodong, Kemiri	600
6	Dsn. Glingseran, Suci	1500
7	PDP	720
8	Transito	191
9	Kebun Durjo	300
10	Wil. Kec. Sukorambi	1744
	TOTAL	7605

Sumber: Data diolah dari sumber data POSKO Bencana Alam Desa Kemiri (dalam buku “Mengenal Bencana Banjir Bandang di Indonesia”)

Selain korban jiwa yang diakibatkan oleh bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Panti juga terdapat kerusakan-kerusakan infrastruktur. Adapun kerusakan-kerusakan tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.3 Jumlah Kerusakan Infrastruktur

NO	JENIS KERUSAKAN	JUMLAH KERUSAKAN
1.	RUMAH	86 rumah hancur total 495 rumah terendam lumpur
2.	PASAR	2 komplek hancur tak berbekas
3.	JEMBATAN	5 buah hancur total
4.	TANGGUL	250m putus
5.	BENDUNG IRIGASI	11 buah rusak total
6.	SAWAH	370 Ha terendam lumpur

Sumber: Data diolah dari sumber data Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kab. Jember (dalam buku “Mengenal Bencana Banjir Bandang di Indonesia”)

Kondisi Kecamatan Panti pasca banjir bandang terlihat sangat mengenaskan. Dilihat dari berapa banyak korban jiwa beserta pengungsi, begitu juga dengan kerusakan infrastrukturnya. Seperti ungkapan Bapak Nuriman selaku Tokoh Masyarakat di Desa Pakis menyatakan,

“terjadi banjir dua kali, 2006 dam jebol habis, lumpur sudah sampek jendela, tahun 2011 bulan Mei kira-kira, tenggelam setengah rumah. Jembatan baru dibangun tapi masyarakat masih khawatir” (sumber: wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2011).

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa bencana yang terjadi dan mengakibatkan banyak kerugian bukan hanya terjadi satu kali saja, akan tetapi kemungkinan terjadi lagi itu pasti. Mengingat kondisi wilayah setempat yang rawan akan bencana serta kondisi masyarakat setempat yang masih trauma akan terjadinya bencana. Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan “sebenarnya apa penyebab banjir bandang yang terjadi di daerah ini pak?”, kemudian Bapak Khairi selaku Pak RT 3 di Dusun Cempoko Desa Pakis memberikan tanggapan bahwa,

“penyebab banjir sebenarnya bukan karena penebangan, tapi banyak yang tumbang karena sudah tua. Dari pemerintah diberitakan disebabkan oleh penebangan” (sumber: wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2011)

Dari jawaban tersebut beliau memberikan tanggapan lanjutan yakni,

“kalau untuk penanggulangan tidak ada, jembatan setiap banjir selalu berbahaya, lubangnya terlalu kecil, pihak-pihak irigasi gak mau tau, kayu-kayu, batu-batu yang terhalang di jembatan yang menyebabkan air tidak bisa lewat” (sumber: wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2011)

Berdasarkan jawaban informan di atas dapat diketahui bahwa kondisi wilayah setempat memang rawan bencana. Perbaikan jembatan oleh pemerintah dirasa kurang tepat sehingga menyebabkan kekhawatiran bagi masyarakat setempat akan datangnya banjir lagi.

4.1.3 Peran Pemerintah dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Kecamatan Panti

Penanggulangan bencana merupakan upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana,

tanggap darurat dan rehabilitasi. Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setempat begitu juga dengan masing-masing tugas, tanggung jawab dan wewenangnya. Seperti halnya yang tertulis dalam UU No. 24 Tahun 2007 BAB.3 Tentang Tanggung Jawab dan Wewenang pemerintah Daerah. Adapun tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

1. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
3. Pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
4. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Sedangkan wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

1. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
2. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
3. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
4. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
5. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
6. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang berskala provinsi, kabupaten/kota.

Upaya penanggulangan bencana alam merupakan usaha bersama semua komponen masyarakat dalam rangka mengurangi dampak terjadinya bencana dengan mendefinisikan secara jelas peranan masing-masing komponen, baik pemerintah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan maupun pihak swasta. Penanggulangan bencana bukan hanya kegiatan bagaimana menangani permasalahan yang timbul pada saat terjadinya bencana, namun meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat tidak terjadi bencana. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah setempat dapat diketahui dari hasil wawancara peneliti dengan pertanyaan sebagai berikut. “bagaimana peran pemerintah setempat dalam penanganan bencana di Kecamatan Panti?”. Kemudian Bapak Rifendy selaku seksi Kesejahteraan Korban Bencana dan Sumbangan Sosial memberikan jawaban bahwa,

“Dinsos sesuai dengan tugasnya sebagai organisasi di Satlak berposisi sebagai sekretaris II yang membidangi bantuan sosial. Bantuan secara langsung dari Dinsos berupa bahan pangan (mie instan, beras) ya sembako. Penyaluran dilakukan secara langsung seperti sandang (kaos, sarung, pakaian wanita dll) langsung dari Dinsos. Ada juga peralatan rumah tangga (wajan, teko, cangkir, sendok).”

Selanjutnya peneliti memberikan pertanyaan lanjutan yaitu, “kalau kegiatan Pengurangan Risiko Bencana bagaimana pak?”. Kemudian beliau memberikan tanggapan sebagai berikut.

“sosialisasi, penyuluhan khusus organisasi taruna siaga bencana juga dilakukan di lokasi-lokasi rawan bencana di Kabupaten Jember. Pemantauan lokasi-lokasi rawan bencana juga dilakukan secara rutin” (sumber: wawancara yang dilakukan pada tanggal 03 November 2011).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah setempat mempunyai banyak peran dalam upaya penanggulangan bencana. Selain memberikan bantuan secara langsung, juga memberikan sosialisasi atau penyuluhan sebagai bentuk upaya dalam rangka Pengurangan Risiko Bencana. Tidak lupa pemantauan terhadap lokasi rawan bencana yang dilakukan secara rutin.

Selanjutnya peneliti ingin mengetahui pihak-pihak yang berperan dalam kegiatan-kegiatan Pengurangan Risiko Bencana yang dilakukan di Kecamatan Panti, maka peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut. “siapa saja yang berperan aktif dari desa sendiri dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bencana di wilayah ini?”. Berikut merupakan jawaban dari Bapak Kusman selaku Kaur Pemerintahan Desa Glagahwero.

“yang berperan ya perangkat desa, kasun berperan sebagai koordinator yang memberikan kabar dari atas” (sumber: wawancara yang dilakukan pada tanggal 24 Maret 2012).

Tidak jauh berbeda dengan tanggapan dari Bapak Rikhwan sebagai Kaur Tani Desa Suci memberikan jawaban sebagai berikut.

“semua berperan, terutama perangkat desa dan masing-masing kasun. Warga juga berperan penting dalam kegiatan yang berkaitan dengan bencana yang dilakukan di wilayah ini.” (sumber: wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 Maret 2012).

Berbeda dengan tanggapan dari beberapa desa lainnya seperti jawaban dari Bapak Sugito selaku perangkat Desa Pakis yang menanggapi bahwa,

“yang berperan dalam Pengurangan Risiko Bencana ya semuanya, mulai dari perangkat sampai pada masyarakat setempat.” (sumber: wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 Maret 2012).

sedangkan tanggapan dari bapak Zaeni selaku Kepala Desa Pakis adalah,

“tokoh masyarakat semua terlibat, kalau kyai bukan termasuk relawan, tapi peran beliau tetap diharapkan agar memberikan motifasi kepada masyarakat.”(sumber: wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2011),

dari jawaban tersebut kemudian beliau melanjutkan dengan tanggapan,

“di Desa Pakis ada juga Desa Siaga yang khusus menangani bencana, dibentuk relawan penanganan bencana. LMDH ada di dalam Desa Siaga, Pak. Hartono sebagai ketuanya.”(sumber: wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2011).

Sedangkan tanggapan dari Bapak Suryono selaku Kepala Desa Kemiri adalah sebagai berikut.

“masyarakatnya sendiri aktif, tokoh ulama’ sangat berperan dalam memberikan motifasi dan mengajak masyarakat untuk mengambil hikmah dari kejadian banjir bandang dengan membentuk semangat pada setiap pengajian. Kalau ormas secara resmi tidak ada.” (sumber: wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2011),

kemudian beliau melanjutkan tanggapannya yaitu,

“Pak Tinggi (istilah panggilan Kepala Desa Kemiri) selalu mengadakan hall banjir bandang setiap tanggal bencana, tepatnya pada setiap tanggal 01 Januari. Acaranya adalah hall banjir bandang 2006 dengan kegiatan istighosah dan pengajian umum. Kegiatannya sempat diliput oleh Indosiar dan Metro”(sumber: wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2011).

Berdasarkan jawaban dari informan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan secara sederhana bahwa dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana di Kecamatan Panti semua pihak berperan aktif. Dari pemerintah daerah sendiri, tokoh masyarakat, bahkan masyarakatnya sendiri juga berperan aktif dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana yang dilakukan di Kecamatan Panti tersebut.

Sedangkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam Pengurangan Risiko Bencana yang tertera pada UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 37 meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut.

1. Pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
2. Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
3. Pengembangan budaya sadar bencana;
4. Peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana;
5. Penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

Kegiatan-kegiatan tersebut diatas merupakan kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana. Akan tetapi mengingat Kabupaten Jember merupakan kabupaten yang belum memiliki Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sehingga dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut tentunya pemerintah setempat berkendala atau kesulitan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya Pengurangan Risiko Bencana tersebut. Pemerintah setempat hanya dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut mereka mampu menjangkaunya. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut. Adapun pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yakni, “apakah kendala yang dialami oleh pemerintah setempat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan upaya Pengurangan Risiko Bencana di Panti pak?”. Pertanyaan tersebut diajukan kepada Kepala Desa Kemiri yaitu Bapak Suryono yang kemudian memberikan tanggapan sebagai berikut.

“kegiatan-kegiatan dalam Pengurangan Risiko Bencana ya banyak mbak, kalau kendala-kendalanya mungkin kalau dari pemerintah desa sendiri ya peralatan yang kurang memadai, semuanya serba manual, kurangnya pengetahuan pemerintah tentang Pengurangan Risiko Bencana” (sumber: wawancara yang dilakukan pada tanggal 23 Juni 2012).

Berdasarkan jawaban dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan secara sederhana bahwasannya dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pengurangan Risiko Bencana yang dilakukan oleh pemerintah setempat di Kecamatan Panti mengalami beberapa kendala atau kesulitan. Hal tersebut dapat diketahui dari jawaban informan diatas. Adapun kendala-kendala yang dialami oleh pemerintah setempat adalah sebagai berikut.

1. Peralatan yang kurang memadai;
2. Kemampuan/pengetahuan pemerintah setempat tentang kegiatan-kegiatan Pengurangan Risiko Bencana

Ditemuinya kendala-kendala tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah daerah setempat memerlukan adanya kemitraan atau kerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan kegiatan Pengurangan Risiko Bencana. Pelaksanaan kegiatan Pengurangan Risiko Bencana yang dilakukan tentunya berhubungan secara langsung

kepada masyarakat setempat. Sehingga perlu diketahui bahwa masyarakat harus mengerti dan memahami tentang upaya-upaya yang harus mereka lakukan dalam Pengurangan Risiko Bencana di wilayah mereka.

Selain pemerintah setempat, masyarakat juga harus mengetahui upaya-upaya apa yang harus mereka lakukan dalam rangka Pengurangan Risiko Bencana. Pengetahuan masyarakat setempat tentang upaya-upaya yang harus dilakukan dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB) diperlukan untuk mengetahui seberapa tercapainya tujuan pemerintah dalam memberdayakan masyarakatnya yang rentan terhadap bencana. Sedangkan untuk mengetahui seberapa tingkat pengetahuan masyarakat di Kecamatan Panti mengenai bahaya bencana alam serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat dalam kegiatan Pengurangan Risiko Bencana maka peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut.”Apakah anda mengetahui tentang adanya kegiatan-kegiatan dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana yang dilakukan di Kecamatan Panti?”. Kemudian Bapak Suyono (warga korban yang menempati rumah bantuan di Desa Kemiri) menjawab,

“saya pernah ikut penyuluhan, ndak tentu, kalau dulu ya tiap bulan, sekarang sudah jarang. Semua korban ikut penyuluhan. Penyuluhan-penyuluhan dari lembaga-lembaga, yayasan-yayasan (YLPI) tentang banjir” (sumber: wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2011).

Dari jawaban tersebut, kemudian peneliti menanggapi dengan pertanyaan sebagai berikut “kira-kira kegiatan apa saja yang dilakukan dalam Pengurangan Risiko Bencana di wilayah ini pak?”. Selanjutnya beliau menjawab,

“penanaman pohon ya penghijauan yang dari desa sendiri. Ada juga yang dari partai” (sumber: wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2011).

Sedangkan tanggapan dari Bapak Said selaku Pak RT di Perumahan Bantuan yang berada di Desa Kemiri yakni,

“dapat bantuan bahan-bahan pokok, setelah banjir sudah gak ada lagi, kira-kira setelah enam bulan sudah gak ada, kalau kegiatannya ada gotong royong, nanem pohon yang kena lahan dan yang kena banjir. Kegiatannya

ya ajakan dari pak kades. Ada juga kerjabakti tiap minggu” (sumber: wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2011).

Berbeda dengan tanggapan Bapak Rikhwan selaku Kaur Tani di Desa Suci yang memberikan tanggapan sebagai berikut.

“iya, saya tau, saya sebagai koordinator bencana di Desa Pakis yang bertugas mengkoordinasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bencana, mengantisipasi dan kegiatan-kegiatan yang lain ” (sumber: wawancara yang dilakukan pada Tanggal 26 Maret 2012)

Dari jawaban tersebut, dapat diketahui bahwa kegiatan dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana telah dilakukan. Bukan hanya sebatas mengantisipasi, akan tetapi semua kegiatan yang berkaitan dengan bencana dikoordinasi secara tepat oleh pemerintah daerah wilayah setempat. Selanjutnya beliau menanggapi,

“posko bencana terpusat di Balai Desa Suci, nomor kontak yang dipasang itu dari pusat. Satkorlak juga selalu mengadakan kunjungan secara rutin”. (sumber: wawancara yang dilakukan pada Tanggal 26 Maret 2012)

Posko Bencana Alam yang terletak di Balai Desa Suci Merupakan posko yang dibuat oleh pemerintah daerah setempat. Hal tersebut dilakukan guna mempermudah akses pengantisipasi terjadinya bencana serta mempermudah akses koordinasi penanggulangan bencana di wilayah tersebut. Berikut merupakan gambar posko bencana alam di Desa Suci yang berpusat di Kantor Desa Suci Kecamatan Panti.

Gambar 4.1 Posko Bencana Alam Desa Suci



Sumber: Data primer Desa Suci

Begitu juga dengan Desa Kemiri yang memiliki pusat posko bencana alam di Kantor Desa Kemiri, kegiatan yang berkaitan dengan bencana secara terpusat berada di Kantor Desa Kemiri. Berikut merupakan gambar posko bencana alam yang terletak di Kantor Desa Kemiri.

Gambar 4.2 Posko Bencana Alam Desa Kemiri



Sumber: Data primer Desa Kemiri

Berbeda dengan Desa Pakis, yang mana desa ini memiliki Pos Pantau Antisipasi Bencana Alam yang dibangun tepat di Dusun Cempaka. Dusun Cempaka merupakan dusun dengan kondisi kerusakan terparah pada saat terjadi bencana banjir bandang dan tanah longsor pada peristiwa yang terjadi di tahun 2006. Pos pantau tersebut merupakan pos yang dibangun oleh pemerintah daerah setempat yang digunakan untuk memantau kondisi wilayah Desa Pakis ketika cuaca sudah dikatakan siaga atau berbahaya. Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Mulyadi selaku Staf Litbang Desa Pakis bahwasannya,

“ada juga pos pantau, itu bantuan dari pemerintah, tapi disitu JICA juga pasang alat sensor air sungai (alatnya juga nyambung sama listrik)”
(sumber: wawancara yang dilakukan pada tanggal 23 April 2012).

Begitu juga dengan ungkapan Bapak Sutrisno selaku Kepala Dusun (Kasun) Cempaka Desa Pakis yakni,

“Pos Pantau bantuan dari pemerintah, dideketnya dipasang alat pengukur ketinggian air sungai dari JICA” (sumber: wawancara yang dilakukan pada tanggal 23 April 2012).

Kemudian beliau melanjutkan tanggapannya yaitu. “tugas saya menyampaikan kabar dari Pos Pantau yang ada di Dusun Cempoko”. Dari jawaban informan di atas dapat diketahui bahwa pembangunan pos pantau antisipasi bencana alam di wilayah setempat dapat menggambarkan peran pemerintah setempat dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana yakni dengan mengkoordinir tugas pemantauan kondisi wilayah melalui pos pantau antisipasi bencana alam. Dengan begitu apabila kondisi wilayah sudah mendekati berbahaya, maka petugas pemantau sudah mulai menyiapkan kesiagaan salah satunya dengan memberikan informasi kepada warga setempat tentang kondisi wilayah tersebut. Berikut merupakan gambar Pos Pantau Antisipasi Bencana Alam Desa Pakis yang terletak di Dusun Cempaka.

Gambar 4.3 Pos Pantau Antisipasi Bencana Alam Desa Pakis



Sumber: Data primer Desa Pakis

Pertanyaan serupa yakni “kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan dalam Pengurangan Risiko Bencana di wilayah ini?” peneliti lontarkan kepada Bapak Hendra selaku perangkat Desa Glagahwero dan kemudian beliau memberikan jawaban sebagai berikut.

“Masyarakat sini sudah sangat sadar bahaya bencana, kalo kondisi siaga ya saling ngingetin satu sama lain. Kebanyakan masyarakat lari ke daerah

yang lebih aman yaitu Desa Glugut perbatasan Desa Glagahwero.”
(sumber: wawancara yang dilakukan pada tanggal 24 Maret 2012)

Kemudian pertanyaan peneliti ajukan kepada Bapak Suryono selaku kepala Desa Kemiri dan beliau menanggapi bahwa,

“ada pelatihan-pelatihan tentang penanggulangan banjir dari aparat desa, dan saya (Pak Kades) ikut acara-acara pelatihan yang diadakan di Malang dan Surabaya. Pelatihan dilakukan diawal tahun 2007, 2008, 2009. Setahun bisa 2 atau 3 kali.”(sumber: wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2011)

Berdasarkan jawaban informan di atas maka dapat diketahui bahwa peran pemerintah bukan hanya sekedar membuat dan membentuk posko bencana dan membangun pos pantau guna mempermudah koordinasi Penanggulangan Bencana. Akan tetapi kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan dalam rangka upaya Pengurangan Risiko Bencana serta keikutsertaan pemerintah daerah setempat dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pihak-pihak lain berupa upaya dalam Pengurangan Risiko Bencana. Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut. “bagaimana kondisi masyarakat desa sini pak ketika diberikan pelatihan-pelatihan tentang penanggulangan bencana?”, adapun jawaban beliau adalah sebagai berikut.

“iya, antusias masyarakat Desa Kemiri bagus sekali, orang-orang di Desa Kemiri sudah paham dan bekalnya kuat, bahkan mereka sudah pernah praktek lapang (simulasi).”(sumber: wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2011)

Begitupula dengan tanggapan dari Bapak Zaeni selaku Kepala Desa Pakis yang memberikan jawaban sebagai berikut.

“kebiasaan masyarakat setelah banjir ya sudah ada kegiatan rutin mulai sebelum banjir kayak kegiatan Jumat bersih pada saat mendekati musim hujan. Pas hujan juga tetep ada kerja bakti. Antusias masyarakat sangat bagus karena sudah menjadi kegiatan yang rutin.” (sumber: wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2011)

Kemudian Bapak Hadi Wiyono selaku ketua BPD di Desa Kemiri juga menanggapi,

“ada penghijauan dan masyarakat sudah mulai sadar penghijauan dan pembuangan sampah disungai, sering disosialisasikan melalui RT

masing-masing tentang bagaimana perilaku yang baik” (sumber: wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2011)

Masyarakat di wilayah Kecamatan Panti sebagian besar sudah mengerti dan tahu tentang bagaimana upaya Pengurangan Risiko Bencana. Sebagian besar dari mereka sudah tau kegiatan apa saja yang harus mereka lakukan dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan jawaban informan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Panti.

Pengurangan Risiko Bencana yang dilakukan di Kecamatan Panti dilaksanakan secara intensif oleh pemerintah daerah setempat. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut. “Kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan dalam Pengurangan Risiko Bencana di wilayah ini?”. Kemudian Bapak Kusman selaku Kaur Pemerintahan Desa Glagahwero menjawab bahwa,

“Kalau Pengurangan Risiko Bencana sifatnya langsung dari kecamatan, ada pelatihan-pelatihan yang diberikan dikecamatan. Perangkat desa ditunjuk untuk mewakili pelatihan-pelatihan yang dilakukan di kecamatan.” (sumber: wawancara yang dilakukan pada tanggal 24 Maret 2012).

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan pertanyaan “kira-kira apa pak yang dilakukan oleh pemerintah tingkat desa sendiri ketika kondisi alam sudah siaga?”. Beliau menjawab,

“yang dilakukan pada saat siaga ya kepala dusun sebagai koordinator menyampaikan kabar dari atas supaya warga setempat segera bersiap-siap menyelamatkan atau mengungsi ke daerah yang lebih aman.” (sumber: wawancara yang dilakukan pada tanggal 24 Maret 2012)

Pertanyaan yang sama peneliti ajukan kepada Saudara Rikhwan selaku Kaur Pertanian sekaligus Koordinator Bencana di Desa Suci dan jawaban dari Saudara Rikhwan adalah sebagai berikut.

“kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam Pengurangan Risiko Bencana ya ada pelatihan-pelatihan, praktek simulasi, himbauan-himbauan, dan

semua perangkat maupun masyarakat berperan aktif dalam kegiatan ini”
(sumber: wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 Maret 2012)

Sedangkan jawaban dari Bapak Zaini selaku Kepala Desa Pakis dengan pertanyaan yang sama adalah sebagai berikut.

“dari pemerintah desa sendiri rutin mengajak masyarakat pada saat menjelang musim hujan. Setiap satu tahun sekali secara resmi pak kades memberikan instruksi kepada ketua RT dan RW untuk menyampaikan kepada masyarakat persiapan menghadapi bencana” (sumber: wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2011)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti tentang bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana dapat diketahui dengan beberapa kegiatan yang dilakukan di Kecamatan Panti. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan bukan hanya kegiatan dalam bentuk gotong royong dalam rangka bersih desa, akan tetapi beberapa kegiatan lain diantaranya keikutsertaan dalam kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan simulasi lapangan mengenai upaya Pengurangan Risiko Bencana.

Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, maka dapat diketahui peran serta kendala yang dialami oleh pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang dilakukan di Kecamatan Panti Kabupaten Jember dan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 4.4 Peran Pemerintah dan Kendala Pemerintah dalam Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana di Kec. Panti

No	Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	Peran Pemerintah	Kendala
1	Pengenalan dan pemantauan risiko bencana	Melakukan kegiatan pemantauan wilayah rawan bencana dan membuat peta rawan bencana	Peralatan yang kurang memadai
2	Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana	Membuat rencana pengantisipasi daerah rawan bencana	Kurangnya pengetahuan tentang PRB
3	Pengembangan budaya sadar bencana	Memberikan pengertian terhadap masyarakat setempat	Kurangnya peralatan serta kurangnya pengetahuan dalam memberikan sosialisasi
4	Peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana	Pembentukan koordinator dalam bidang kebencanaan	Ketepatan pembentukan yang kurang tegas
5	Penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana	Pengadaan kegiatan-kegiatan yang menunjang upaya PRB Pengadaan alat pantau yang kondusif	Kurangnya peralatan yang memadai

Sumber: Data diolah dari sumber data primer hasil wawancara

Tabel tersebut menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam Pengurangan Risiko Bencana sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2007. Adapun peran pemerintah dalam kegiatan tersebut dapat diketahui dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kendala-kendala yang dialami oleh pemerintah berbagai macam, untuk itu tidak menutup kemungkinan diperlukan bagi pemerintah melakukan semacam kerjasama atau kemitraan dalam pelaksanaan kegiatan Pengurangan Risiko Bencana di Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

4.1.4 Peran *Non Governmental Organization (NGO)* dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Kecamatan Panti

Lembaga-lembaga nonpemerintah (NGO) banyak berkontribusi pada saat bencana banjir bandang terjadi di Kecamatan Panti, saat terjadi bencana maka bantuan-bantuan secara otomatis berdatangan. Bantuan yang diberikan terdiri dari dua macam yakni bantuan yang diberikan secara langsung maupun bantuan yang diberikan secara tidak langsung. Pertanyaan awal peneliti tentang pihak lain yang berperan dalam upaya Pengurangan Risiko bencana yang dilakukan di Kecamatan Panti adalah sebagai berikut. “Apakah tidak ada lembaga lain yang berperan dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bencana di wilayah ini?”

“Lembaga-lembaga banyak, ada CBDRM-NU, TIM-SAR, YPM, JICA. Akan tetapi JICA memberikan kontribusi terbanyak, memberikan bantuan langsung maupun pelatihan, pelatihan diberikan secara merata, korban bencana dan warga-warga di tiap dusun dapat pelatihan semua.”(sumber: wawancara yang dilakukan pada tanggal 07 Juli 2011).

Kemudian Bapak Zaeni selaku Kepala Desa Pakis menanggapi,

“ada pemberdayaan dari JICA yang bekerjasama dengan Pemkab dan Bakesbang setau saya. Kegiatannya macam-macam, ada penyuluhan sampai praktek simulasi tentang bagaimana jika ada banjir lagi”(sumber: wawancara yang dilakukan pada Tanggal 16 Oktober 2011)

selanjutnya beliau mengatakan bahwa,

“penyuluhan dari JICA seingat saya tiga kali, kalau kunjungannya sering sekali. Dipasang juga alat pendeteksi curah hujan dan ketinggian air sungai.” (sumber: wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2011).

Pertanyaan serupa peneliti ajukan kepada Bapak Rikhwan selaku Kaur Tani di Desa Suci, Kemudian beliau menjawab bahwa,

“JICA memberikan banyak bantuan, malah sekarang sudah memasang alat untuk memantau kondisi rawan bencana di Desa Suci. Alat dipasang sekitar dua bulan yang lalu.”(sumber: wawancara pada tanggal 26 Maret 2012).

Begitu juga dengan jawaban dari Bapak Sugito sebagai salah satu koordinator bencana di Desa Pakis yang menyatakan bahwa,

“Bantuan terbanyak ya dari JICA, ada pelatihan dan semua perangkat mengikuti pelatihan tersebut. JICA juga sudah memasang alat pemantau iklim di Desa Pakis yang digunakan untuk memantau arah angin, curah hujan dan suhu.”(sumber: wawancara pada tanggal 28 Maret 2012),

kemudian beliau melanjutkan tanggapannya yaitu,

“saya selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan JICA, misalnya pelatihan-pelatihan sampai pada pemasangan dan pengoperasian alat pemantau curah hujan, masyarakat sini tau ada alat yang dipasang oleh JICA dan masyarakat sekitar yang merawat alatnya. Mereka sudah sadar akan bahaya bencana” (sumber: wawancara pada Tanggal 28 Maret 2012).

Sedangkan Bapak Musawir selaku perangkat di Kantor Desa Pakis menanggapi,

“yang di pos pantau ada juga alat pengukur ketinggian air sungai. JICA ngasih HT, tapi sekarang sudah lowbatt semua” (sumber: wawancara yang dilakukan pada tanggal 23 April 2012).

Sedangkan untuk mengetahui lembaga mana saja yang memberikan sumbangan berupa bantuan langsung, maupun bantuan secara tidak langsung yang di berikan di Kecamatan Panti, maka peneliti melontarkan pertanyaan yaitu, “Siapa saja lembaga atau donatur yang memberikan bantuan pada saat bencana banjir bandang terjadi?” yang kemudian pertanyaan tersebut diajukan kepada masing-masing kepala desa di Kecamatan Panti. Adapun ungkapan Bapak Suryono selaku Kepala Desa Kemiri Kecamatan Panti bahwa,

“Donatur berasal dari seluruh komponen, baik swasta, BUMN, BUMD, pemerintah tingkat provinsi, pemerintah pusat, pemerintah dari luar daerah, dari LSM, partai-partai, JICA, Ormas, CBDRM-NU, Muhammadiyah dan lain-lain, tapi yang dari partai-partai itu biasanya memiliki kepentingan dan kesannya gak ikhlas.”(sumber: wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2011)

Pertanyaan yang sama juga peneliti lontarkan kepada salah satu koordinator bencana dan sebagai Kaur Tani di Desa Suci Bapak Rikhwan mengatakan bahwa,

“Kalau bantuan banyak sekali, ada yang dari Tionghoa berupa makanan dan pakaian, JICA berupa tenda pada waktu bencana banjir bandang, dari alumni, mahasiswa, maupun dari kecamatan lain. Bantuan perumahan dari Tionghoa ada di dua dusun, di Dusun Gaplek ada 86 rumah, sisanya ada 23 rumah.”(sumber: wawancara yang dilakukan pada Tanggal 26 Maret 2012)

Begitu juga dengan jawaban dari Bapak Kusman selaku Kaur Pemerintahan Desa Glagahwero sebagai berikut.

“Ada makanan, pakaian, rumah juga. Bantuan langsung dari kecamatan, pada saat bencana saya membantu korban sebagai koordinator. Kalau orang-orang yang berperan dalam Pengurangan Risiko Bencana ya Perangkat Desa termasuk saya.”(sumber: wawancara yang dilakukan pada tanggal 24 Maret 2012)

Bapak Sugito selaku perangkat Desa Pakis juga mengungkapkan bahwa,

“bantuan secara langsung ya makanan, pakaian dan perumahan. Bantuan tidak langsungnya ya pelatihan-pelatihan”. (sumber: wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 Maret 2012).

Tidak lain halnya dengan tanggapan dari Bapak Zaeni selaku Kepala Desa Pakis bahwasannya,

“bantuan yang diberikan secara langsung berupa sembako, bantuannya dari alumni-alumni pendidikan, PMI, Dinsos, dari kabupaten, dari pemerintah setempat, relawan-relawan, UNEJ, juga dari desa sendiri” (sumber: wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2011)

Dari jawaban informan melalui wawancara yang peneliti lakukan, maka dapat diketahui bahwa pada saat terjadinya bencana banjir bandang dan tanah longsor pada tanggal 01 Januari 2006 di Kecamatan Panti begitu banyak lembaga-lembaga pemerintah maupun nonpemerintah yang memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung. Adapun bantuan yang diberikan secara langsung bersifat bantuan dalam jangka pendek, sedangkan bantuan tidak langsung merupakan bantuan yang bersifat jangka panjang. Kemudian peneliti juga mengajukan pertanyaan tentang apa saja yang dilakukan oleh lembaga-lembaga non pemerintah dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana di Kecamatan Panti dengan pertanyaan sebagai berikut.

“bagaimana peran lembaga sendiri dalam Pengurangan Risiko Bencana yang dilakukan di Kecamatan Panti?”. Kemudian Bapak Luqman selaku wakil Sekjend NU-Kabupaten Jember memberikan tanggapan bahwa,

“tidak hanya bergerak pada saat bencana saja, tapi seluruh siklus. Mulai dari manajemen risiko sampai pada manajemen tanggap darurat.”(sumber: wawancara yang dilakukan pada tanggal 04 November 2011).

Dari jawaban tersebut selanjutnya beliau menanggapi lagi dengan pernyataan sebagai berikut.

“yang dilakukan di Kecamatan Panti ada sosialisasi, pemetaan risiko, membuat *early warning system* berbasis masyarakat (alat manual), selain itu juga melakukan amatan, *assesment* ringan tentang Pengurangan Risiko Bencana”. (sumber: wawancara yang dilakukan pada tanggal 04 November 2011)

Dapat diketahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga nonpemerintah dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana di Kecamatan Panti antara lain seperti yang dinyatakan oleh informan tersebut yakni berupa pemetaan risiko, membuat alat peringatan dini dan kegiatan-kegiatan yang lain. Sedangkan tanggapan dari lembaga *Japan International Cooperation Agency (JICA)* bahwa,

“*early warning system for banjir bandang* (sistem peringatan dini untuk banjir bandang) terdiri dari tiga point yaitu, *hazard map* (pemetaan kerawanan), sosialisasi/penyuluhan serta pemasangan alat”. (sumber: wawancara yang dilakukan pada tanggal 03 November 2011)

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, maka dapat diketahui bahwa pada saat bencana banjir bandang terlihat begitu banyaknya organisasi-organisasi pemerintah maupun non-pemerintah yang memberikan bantuan. Ada bantuan yang diberikan secara langsung maupun secara tidak langsung. Bantuan yang diberikan secara langsung yakni bantuan berupa sandang, pangan, papan serta obat-obatan. Sedangkan bantuan secara tidak langsung diberikan pada saat tidak terjadi bencana yakni melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan, sosialisai bahkan simulasi dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana. Adapun lembaga-lembaga non pemerintah/NGO yang

memberikan bantuan secara langsung dan tidak langsung pada saat bencana banjir bandang serta pada saat pasca bencana banjir bandang di Kecamatan Panti sangat banyak sekali. Mengingat begitu banyaknya lembaga yang berkontribusi dalam penanggulangan bencana yang terjadi Di Kecamatan Panti maka peneliti sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 4.5 Lembaga-Lembaga yang berkontribusi dalam Penanggulangan Bencana di Kecamatan Panti

No	Lembaga Non Pemerintah (NGO)	Jenis Kontribusi	
		Bantuan Langsung	Bantuan Tak Langsung
1	JICA (<i>Japan International Cooperation Agency</i>)	Tenda-tenda pengungsi	- Pemantauan - Pemberdayaan - Pelatihan-pelatihan - Simulasi/ Praktek - Pemasangan alat pantau
2	NU (Nahdatul Ulama')	-	- Program CBDRM (Santri Siaga Bencana) - Sosialisasi - Pemetaan risiko - Membuat <i>early warning system</i>
3	Muhammadiyah		- Penyuluhan
4	Tiong-Hoa	Bantuan Rumah (Ds. Pakis)	-
5	Perkumpulan Mahasiswa	Makanan (bahan pokok pangan)	-
6	PMI (Palang Merah Indonesia)	Obat-obatan PPPK (P3K)	-
7	Perkumpulan Alumni2	Bantuan langsung	-
8	LMDH	Relawan bencana	-
9	Green Radio	Bantuan langsung	-
10	Alam Hutan		Pemasangan alat
11	YLPI		- Penyuluhan
12	Remas Al-Muttaqin	Posko banjir bandang	-
13	Sahabat Alam (Jateng)	Bantuan pangan,	- Penghijauan

Sumber: Data diolah dari sumber data primer hasil wawancara

Data di atas merupakan data mengenai berbagai lembaga yang memberikan sumbangan pada saat terjadi bencana dan pasca bencana atau pada saat tidak terjadi

bencana. Lembaga-lembaga tersebut merupakan lembaga nonpemerintah yang berkontribusi dalam penanggulangan bencana di Kecamatan Panti. Dari data tersebut dapat diketahui begitu banyak sumbangsih dari masing-masing lembaga dengan berbagai macam bentuk bantuan yakni bantuan secara langsung dan bantuan secara tidak langsung.

Selanjutnya peran *Non Governmental Organization (NGO)* dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang dilakukan di Kecamatan Panti beserta kendala-kendala yang dialami berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.6 Peran *Non Governmental Organization (NGO)* dan Kendala *NGO* dalam Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana di Kecamatan Panti

No	Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	Peran <i>Non Governmental organization (NGO)</i>	Kendala
1	Pengenalan dan pemantauan risiko bencana	Pembuatan peta rawan bencana dan pemantuan wilayah rawan bencana	Kurang menguasai medan atau lokasi
2	Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana	Ikut serta dalam pembuatan perencanaan oleh pemerintah setempat	-
3	Pengembangan budaya sadar bencana	Memberikan sosialisasi dan praktek simulasi	Penyelarasan dengan kebiasaan masyarakat setempat
4	Peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana	Turut serta dalam pembentukan koordinasi kebencanaan di wilayah setempat	-
5	Penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana	Pemasangan peralatan pengantisipasi bencana	Lokasi yang sulit dijangkau

Sumber: Data diolah dari sumber data primer hasil wawancara

Tabel di atas merupakan tabel yang menunjukkan kegiatan-kegiatan serta peran yang dilakukan oleh *Non Governmental Organization (NGO)* dalam Pengurangan Risiko Bencana di Kecamatan Panti kabupaten Jember. Tabel tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pengurangan Risiko Bencana pihak *NGO* memiliki peran tersendiri yang sedikit berbeda dengan peran yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan dalam pelaksanaannya hanya beberapa yang mengalami kesulitan atau kendala dari pihak *NGO* itu sendiri. Sehingga ketika melaksanakan perannya dalam kegiatan Pengurangan Risiko Bencana pihak *NGO* tentunya membutuhkan dukungan dari pihak pemerintah setempat.

Sedangkan hasil temuan peneliti di lapangan lembaga yang memberikan sumbangan terbanyak yaitu *JICA (Japan International Cooperation Agency)*. *JICA* tidak hanya memasang alat Pemantau Curah Hujan, Suhu dan Arah Angin di daerah rawan bencana di Kecamatan Panti. Akan tetapi juga memasang alat pengukur ketinggian air sungai. Berikut adalah gambar alat pemantau yang dipasangkan oleh *JICA* yang terletak di Balai Desa Pakis Kecamatan Panti.

Gambar 4.4 Alat Pemantau Curah Hujan, Suhu dan Arah Angin di Desa Pakis



Sumber: Data Primer Desa Pakis, 2012

Menurut Bapak Musawir salah satu perangkat di Balai Desa Pakis memberikan penjelasan mengenai cara kerja alat tersebut yakni,

“alatnya nyambung sama listrik, yang diluar itu nyambung sama monitor di dalam ruangan kantor desa yang disambungkan dengan komputer, monitor menunjukkan ukuran besarnya curah hujan, angin dan suhu”
(sumber: wawancara yang dilakukan pada tanggal 23 April 2012)

Monitor yang berada di dalam kantor desa berfungsi sebagai pemantau ukuran suhu, arah angin dan curah hujan. Alat yang dipaang tersebut kemudian disambungkan dengan komputer yang berguna untuk merekam dan mengeluarkan print out atau cetakan ukuran suhu, angin dan curah hujan hari-hari sebelumnya. Berikut merupakan monitor yang terpasang di dalam Kantor Desa Pakis Kecamatan Panti,

Gambar 4.5 Monitor Pemantau Curah Hujan, Angin, dan Suhu



Sumber: Data Primer Desa Pakis, 2012

Kemudian alat tersebut disambungkan dengan alat perekam dan disambungkan dengan komputer. Adapun gambar peralatan beserta komputer yang terpasang di Kantor Desa Pakis kecamatan Panti adalah sebagai berikut.

Gambar 4.6 Alat Perekam Data dan Komputer



Sumber: Data Primer Desa Pakis, 2012

Sedangkan tanggapan tentang alat yang dipasangkan JICA (*Japan International Cooperation Agency*) oleh Bapak Suryono selaku Kepala Desa Kemiri adalah,

“alat yang dipasangkan JICA digunakan untuk mengukur suhu, arah angin dan curah hujan, itu di dalamnya disambungkan dengan monitor untuk melihat kondisi ketiga-tiganya ya itu tadi, suhu, arah angin dan curah hujan. Tapi masalahnya kemarin pemasangan kurang sempurna. Jadi hasil data nya tidak bisa di print-out. Kayaknya penginstalannya yang kurang, kalau di Pakis bisa” (sumber: wawancara yang dilakukan pada Tanggal 14 April 2012).

Japan International Cooperation Agency (JICA) juga memasang alat yang sama di Desa Kemiri, yaitu alat pemantau curah hujan, suhu dan arah angin. Alat tersebut dipasang tepat di Balai Desa Kemiri. Alat tersebut digunakan untuk mengetahui dan mengukur curah hujan, suhu dan arah angin. Jadi apabila ukuran ketiga-tiganya menunjukkan kondisi berbahaya, maka pemerintah setempat bisa dengan segera memberikan himbauan terhadap masyarakatnya untuk bersiap siaga untuk

mengantisipasi bencana. Berikut merupakan gambar alat pemantau curah hujan, suhu dan arah angin yang dipasang oleh JICA di Balai Desa Kemiri.

Gambar 4.7 Alat Pemantau Curah Hujan, Suhu dan Arah Angin di Desa Kemiri



Sumber: Data Primer Desa Kemiri, 2012

Gambar di atas merupakan gambar alat pemantau curah hujan, suhu dan angin yang dipasangkan oleh JICA di Desa Kemiri. Alat tersebut memiliki cara kerja yang sama dengan alat yang dipasangkan di Desa Pakis.

Begitu banyak lembaga-lembaga nonpemerintah yang memberikan bantuan pada saat bencana banjir bandang. Namun hanya beberapa lembaga yang memberikan bantuan secara tidak langsung atau lembaga yang berkontribusi dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana di Kecamatan Panti. Berdasarkan temuan dilapangan dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, maka dapat disajikan lembaga-lembaga yang berkontribusi dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana di Kecamatan Panti sebagai berikut.

Tabel 4.7 Lembaga yang berkontribusi dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana di Kecamatan Panti

No	Lembaga Non Pemerintah (NGO)	Bentuk Bantuan dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB)
1	JICA (<i>Japan International Cooperation Agency</i>)	- Pemantauan - Pemberdayaan - Pelatihan-pelatihan - Simulasi/ Praktek - Pemasangan alat pantau
2	NU (Nahdatul Ulama')	- Program CBDRM (Santri Siaga Bencana) - Sosialisasi - Pemetaan risiko - Membuat <i>early warning system</i>
3	Muhammadiyah	- Penyuluhan
4	Alam Hutan	Pemasangan alat
5	YLPI	- Penyuluhan
6	Sahabat Alam (Jateng)	- Penghijauan

Sumber: Data diolah dari sumber data primer hasil wawancara

Berdasarkan penyajian data di atas, maka dapat dilihat bahwa JICA merupakan lembaga yang menyumbangkan bantuan terbanyak. Adapun bantuan yang diberikan JICA terdiri dari bantuan secara langsung yang diberikan pada saat terjadi bencana alam banjir bandang dan bantuan tidak langsung berupa pelatihan-pelatihan yang diberikan pasca banjir bandang. Kemudian dilanjutkan dengan proyek pembuatan peta bencana serta pemasangan alat pemantau banjir bandang yang dipasang di dua desa di Kecamatan Panti. Adapun desa tersebut adalah Desa Pakis dan Desa Kemiri. Desa tersebut adalah desa yang memiliki potensi rawan bencana terbesar di Kecamatan Panti, sehingga Pemerintah setempat merasa memerlukan kerjasama dengan pihak-pihak yang mampu memberikan kontribusi terhadap Pengurangan Risiko Bencana di kawasan Panti, dan JICA lah lembaga yang dianggap mampu dan bisa memberikan sumbangan terbanyak hingga pemasangan alat pemantau banjir bandang di Kecamatan Panti.

Badan Kerjasama Internasional Jepang atau yang lebih sering dikenal sebagai JICA (*Japan International Cooperation Agency*) adalah sebuah lembaga yang didirikan oleh pemerintah Jepang untuk membantu pembangunan negara-negara berkembang. Lembaga ini berada di bawah kekuasaan Departemen Luar Negeri dan didirikan pada Agustus 1974. Lembaga ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama internasional antara Jepang dengan negara-negara lain. Pada 1 Oktober 2003 lembaga ini dijadikan sebuah institusi administrasi yang mandiri. JICA menolong pengembangan pemerintah dengan memberikan bantuan teknis dan dana yang tidak mengikat. Tujuan JICA adalah membangaun daya manusia di negara berkembang atau memperkuat organisasi-organisasi, membantu dalam kebijaksanaan pembangunan negara berkembang, dan melakukan penelitian untuk rencana dasar atau kemungkinan pelaksanaan operasi pembangunan. Selain itu lembaga itu terkenal karena mereka mengirim orang muda atau tua kepada negara berkembang sebagai “Korps pertolongan”.

JICA sebagai lembaga yang memberikan kontribusi terbanyak dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bencana alam di Kecamatan Panti telah melakukan banyak kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan pihak JICA adalah sebagai berikut.

1. Kerjasama Institusi

Untuk meningkatkan kinerja penanganan banjir bandang Pemerintah telah melakukan upaya kerjasama institusional dengan beberpa pihak, baik masyarakat setempat, lembaga swadaya masyarakat (LSM). *Japan International Cooperation Agency (JICA) – Integrated Disaster Mtigation Management Project for Banjir Bandang* bersama Direktorat Sungai Danau dan Waduk, Ditjen SDA telah melakukan berbagai upaya manajemen mitigasi bencana secara terintegrasi. Berbagai kegiatan yang dilakukan seperti seminar, lokakarya, kajian masalah, simulasi kesiapsiagaan dan sosialisasi. Sosialisasi penanganan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir bandang dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Penting sekali untuk melibatkan masyarakat agar kegiaitan tersebut secara

terpadu mulai dari tingkat bawah. Kemudian beberapa hasil survey dan kajian para pakar (expert) baik dari JICA maupun Kementerian Pekerjaan Umum ataupun pihak lain, perlu ditindaklanjuti untuk mendapatkan langkah strategi secara terintegrasi dalam manajemen mitigasi bencana khususnya bencana banjir bandang di Indonesia.

2. Simulasi Kesiapsiagaan

Untuk kesiapsiagaan dilakukan pelatihan simulasi menghadapi bencana, dengan melibatkan potensi daerah, pemerintah daerah, swasta, LSM, masyarakat, dan relawan. Untuk lokasi yang sudah dikategorikan rawan bencana, sebaiknya pemerintah memasang peta rawan bencana beserta jalur evakuasinya, agar masyarakat umum mengetahuinya sehingga memudahkan penanganan saat terjadi bencana.

3. Pemasangan dan Maintenance Alat Monitoring System

Peningkatan maintenance alat monitoring system seperti:

- alat pengukur curah hujan,
- alat pengukur level ketinggian air sungai
- alat pengukur rekahan (ekstensometer)

Alat-alat tersebut sangat mendukung untuk peringatan dini (*warning system*), sehingga dapat dilakukan langkah sebelum terjadinya bencana.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga JICA (*Japan International Cooperation Agency*) telah menyumbangkan banyak manfaat. Diantaranya JICA mampu membangun kepedulian pemerintah daerah terhadap intensitas bencana alam yang kemudian secara otomatis masyarakat juga tanggap terhadap penanggulangan bencana dan kegiatan-kegiatan Pengurangan Risiko Bencana.

4.1.5 Kemitraan Pemerintah Daerah dan *Non Governmental Organization* (NGO) dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Kecamatan Panti

Upaya Pengurangan Risiko Bencana yang dilakukan di Kecamatan Panti oleh Pemerintah Daerah setempat sudah dilakukan secara maksimal, akan tetapi kemampuan pemerintah daerah dalam mengupayakan hal-hal terkait Pengurangan Risiko Bencana sangatlah terbatas, sehingga diperlukan adanya kerjasama atau kemitraan antara pemerintah sendiri dengan pihak-pihak yang dirasa mampu memberikan kontribusi dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana. Begitu juga dengan kemitraan yang terjalin antara Pemerintah Daerah dan *NGO* dalam Pengurangan Risiko Bencana yang dilakukan di Kecamatan Panti, untuk mengetahui secara sederhana tentang bagaimana proses kemitraan yang terjadi, maka peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut. “Bagaimana bentuk kerjasama atau kemitraan yang dibentuk dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana di Kecamatan Panti Pak?”. Kemudian Bapak Suryono selaku Kepala Desa Kemiri memberikan tanggapan yaitu,

“bentuk kerjasama yang terjadi ya pemerintah desa mengajak dan berperan sebagai fasilitator, kalau LSM secara resmi tidak ada di desa ini, jadi ornop-ornop yang memberikan bantuan itu yang aktif” (sumber: wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2011).

Selanjutnya beliau memberikan tanggapan yakni,

“iya, bantuan serta kerjasamanya bagus dan menguntungkan. Karena menurut saya mereka lebih tau dan lebih ahli dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan bencana termasuk Pengurangan Risiko Bencana. Peralatan mereka lebih lengkap juga” (sumber: wawancara yang dilakukan pada tanggal 23 Juni 2012).

Kemudian peneliti memberikan pertanyaan lanjutan yang peneliti ajukan kepada Bapak Suryono selaku Kades Desa Kemiri yaitu, “bagaimana pembagian kerjasama yang dilakukan pak, apakah ada kesepakatan tersendiri saat proses kerjasama dilakukan?”

“tidak ada kesepakatan secara resmi, kalau ada tawaran bantuan pak kades tidak pernah tanda tangan, tapi kalau ada tawaran yang berkaitan dengan upaya Pengurangan Risiko Bencana ya senang sekali mbak” (sumber: wawancara yang dilakukan pada tanggal 23 Juni 2012)

Selanjutnya peneliti memberikan pertanyaan yakni, “kalau masalah pembagian kegiatan-kegiatan dalam Pengurangan Risiko Bencana itu sendiri bagaimana pak?”, berikut merupakan tanggapan dari Bapak Suryono.

“pemerintah memiliki kegiatan sendiri, lembaga juga mempunyai kegiatan sendiri, tapi kalau lembaga merasa kesulitan baru pihak pemerintah memberikan kontribusinya sebagai fasilitator” (sumber: wawancara yang dilakukan pada tanggal 23 Juni 2012)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bagaimana proses terjadinya kemitraan dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana di Kecamatan Panti. Dimulai dari kendala-kendala yang dialami oleh pemerintah setempat serta keberadaan organisasi-organisasi nonpemerintah yang berperan dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana, pada dasarnya pemerintah dan lembaga-lembaga nonpemerintah masing-masing mempunyai kegiatan tersendiri, akan tetapi ketika salah satu pihak yaitu lembaga nonpemerintah mengalami kesulitan maka pemerintah setempat akan bertindak sebagai fasilitator dalam kegiatan kemitraan tersebut. Begitu juga dengan kendala-kendala yang dialami oleh pemerintah setempat yang tidak menutup kemungkinan pasti memerlukan adanya peran lembaga-lembaga nonpemerintah dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana yang dilakukan di Kecamatan Panti tersebut. Pemerintah bertugas mengawasi dan memperlancar kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh NGO yang berperan dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana yang dilakukan di wilayah tersebut.

Berikut merupakan alur proses terjadinya kemitraan yang terjadi antara Pemerintah dengan *Non Governmental Organization (NGO)* dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang dilakukan di Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

kerjasama atau kemitraan dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana yang dilakukan di Kecamatan Panti, Kabupaten Jember.

Selanjutnya peneliti sajikan tabel bentuk kemitraan yang terjadi di antara pemerintah dengan *NGO* yang dilakukan dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana di Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

Tabel 4.8 Bentuk Kemitraan Pemerintah dengan *NGO* dalam Pengurangan Risiko Bencana di Kecamatan Panti

No	Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	Peran Pemerintah	Peran <i>NGO</i>	Bentuk Kemitraan
1	Pengenalan dan pemantauan risiko bencana	Melakukan kegiatan pemantauan wilayah rawan bencana dan membuat peta rawan bencana	Pembuatan peta rawan bencana dan pemantuan wilayah rawan bencana	
2	Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana	Membuat rencana pengantisipasi daerah rawan bencana	Ikut serta dalam pembuatan perencanaan oleh pemerintah setempat	Kemitraan yang terjadi antara Pemerintah Daerah dan <i>Non Governmental Organization (NGO)</i> dalam Pengurangan Risiko Bencana yang dilakukan di Kecamatan Panti adalah merujuk pada bentuk kemitraan dengan model <i>Pseudo Partnership</i> (kemitraan semu).
3	Pengembangan budaya sadar bencana	Memberikan pengertian terhadap masyarakat setempat	Memberikan sosialisasi dan praktek simulasi	
4	Peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana	Pembentukan koordinator dalam bidang kebencanaan	Turut serta dalam pembentukan koordinasi kebencanaan di wilayah setempat	
5	Penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana	Pengadaan kegiatan-kegiatan yang menunjang upaya PRB Pengadaan alat pantau yang konduktivitas	Pemasangan peralatan pengantisipasi bencana	

Sumber: Data diolah dari sumber data primer hasil wawancara

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan dan merujuk pada pendapat (Sulistiyani, 2004) maka dapat diketahui bahwa kemitraan yang terjadi antara Pemerintah Daerah dan *NGO* dalam Pengurangan Risiko Bencana

di Kecamatan Panti adalah kemitraan dengan model *Pseudo Partnership* atau Kemitraan Semu, yaitu merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Ada suatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Seperti yang telah peneliti ungkapkan bahwasanya dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana peran pemerintah daerah sangat mendominasi, hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah merupakan pihak yang bisa dikatakan paling dekat atau berhubungan secara langsung dengan rakyat. Sehingga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tentunya sebagian besar dilakukan oleh pemerintah setempat. Adapun kegiatan-kegiatan dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat adalah sebagai berikut.

1. Melakukan kegiatan pemantauan wilayah rawan bencana dan membuat peta rawan bencana;
2. Membuat rencana pengantisipasi daerah rawan bencana;
3. Memberikan pengertian terhadap masyarakat setempat agar memiliki budaya sadar bencana;
4. Pembentukan koordinator dalam bidang kebencanaan;
5. Pembuatan alat pantau yang kondusif.

Adapun pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tentunya pemerintah daerah setempat mengalami berbagai kesulitan atau kendala-kendala yang disebabkan oleh kemampuan pemerintah daerah itu sendiri sangatlah terbatas. Sehingga pihak pemerintah daerah setempat mengharapkan adanya pihak-pihak lain yang memberikan bantuan dalam kegiatan Pengurangan Risiko Bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Sedangkan pihak-pihak lain yang dimaksudkan adalah *Non Governmental Organization* (NGO) atau lembaga-lembaga nonpemerintah yang mempunyai latar belakang sosial yang berorientasi pada masyarakat dan lebih ahli serta memahami hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB).

Keberadaan lembaga-lembaga nonpemerintah dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana sangatlah diharapkan, terlebih peran lembaga-lembaga tersebut tentunya memberi manfaat bagi pihak pemerintah daerah setempat demi kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang dilakukan. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang diharapkan oleh pemerintah daerah setempat dari lembaga-lembaga nonpemerintah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Membantu pembuatan peta rawan bencana serta pemantauan wilayah rawan bencana;
2. Turut serta dalam pembuatan perencanaan antisipasi bencana bersama pemerintah daerah setempat;
3. Memberikan sosialisai atau penyuluhan-penyuluhan beserta praktik simulasi tanggap darurat bencana;
4. Turut serta dalam pembentukan koordinator bidang kebencanaan;
5. Memasang peralatan-peralatan yang bisa membantu upaya Pengurangan Risiko Bencana.

Peran pemerintah daerah setempat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) memang mendominasi, akan tetapi tidak

menutup kemungkinan bahwa dalam pelaksanaan kegiatannya pemerintah daerah setempat mengalami kesulitan-kesulitan atau kendala, sehingga keberadaan lembaga-lembaga nonpemerintah diperlukan. Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Panti yang mana Kecamatan Panti merupakan kecamatan yang tergolong berpotensi terkena bencana. Hal tersebut terbukti pada tahun 2006 tepatnya pada tanggal 01 Januari 2006 terjadi bencana alam banjir bandang dan tanah longsor yang mengakibatkan banyak kerugian. Berawal dari kejadian tersebut maka bantuan-bantuan secara otomatis berdatangan. Bantuan-bantuan yang datang berasal dari berbagai macam lembaga baik lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga nonpemerintah. Sedangkan bantuan yang diberikan bersifat langsung dan tidak langsung. Bantuan tidak langsung yang dimaksudkan disini adalah bantuan yang bersifat jangka panjang atau bantuan-bantuan yang diberikan dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB).

Berbagai macam kegiatan-kegiatan dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) sudah dilakukan di Kecamatan Panti terutama kegiatan dilakukan setelah terjadinya bencana banjir bandang pada tahun 2006 atau pasca banjir bandang. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut dimulai dari kegiatan pembuatan peta rawan bencana serta pemantauan daerah rawan bencana, membuat rencana pengantisipasi daerah rawan bencana, memberikan pengertian terhadap masyarakat setempat agar memiliki budaya sadar bencana dengan kegiatan bersih desa secara rutin serta himbauan-himbauan yang selalu diberikan ketika ada kegiatan perkumpulan di desa, pembentukan koordinator dalam bidang kebencanaan dengan membentuk koordinator tiap dusun dan diberikan tugas masing-masing, serta pembuatan alat pantau yang kondusif. Akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut pemerintah daerah di wilayah Kecamatan Panti mengalami kesulitan. Seperti halnya pada kegiatan pengembangan masyarakat tentang sadar bencana serta pemasangan alat antisipasi bencana. Pemerintah daerah setempat belum memiliki peralatan yang memadai yang dapat digunakan untuk memberikan sosialisai atau penyuluhan kepada masyarakat sehingga pemerintah daerah setempat sedikit kesulitan karena setelah

memberikan penyuluhan tidak bisa melakukan praktek atau simulasi langsung. Begitu juga dengan alat-alat semacam alarm pengantisipasi bencana, pemerintah setempat hanya mampu memasang alat manual berupa kentongan yang fungsinya sangat minim. Untuk itu pemerintah mengharapkan keberadaan lembaga-lembaga nonpemerintah dapat memberikan bantuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang dilakukan di Kecamatan Panti.

Keberadaan lembaga-lembaga nonpemerintah dalam kegiatan upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang dilakukan di Kecamatan Panti sangat diharapkan dapat membantu pemerintah daerah setempat. Akan tetapi pada kenyataannya lembaga-lembaga tersebut memiliki kegiatan-kegiatan sendiri. Sehingga kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga nonpemerintah tidak secara keseluruhan didampingi oleh pemerintah daerah setempat, hal tersebut dikarenakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat tidak berlangsung secara berkesinambungan. Begitu juga dengan lembaga-lembaga nonpemerintah yang melaksanakan kegiatan-kegiatan upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Kecamatan Panti yang pelaksanaannya tidak terjadwal dengan jelas. Namun ketika lembaga-lembaga ini mengalami kesulitan dalam pelaksanaan kegiatannya, barulah pemerintah daerah setempat turun tangan dan memberikan bantuan. Dengan adanya lembaga-lembaga tersebut, pemerintah daerah setempat juga tidak merasa dirugikan malah sebaliknya lembaga-lembaga ini dianggap lebih mampu dan ahli dalam bidang bencana, bahkan lembaga-lembaga tersebut mempunyai peralatan yang lebih lengkap dibandingkan dengan pemerintah daerah setempat sendiri. Sehingga meskipun tidak ada kesepakatan secara khusus antara lembaga-lembaga nonpemerintah dengan pemerintah daerah setempat, namun keduanya sama-sama merasa penting melakukan kerjasama atau kemitraan dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang dilakukan di Kecamatan Panti. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan keterbukaan pemerintah menerima keberadaan lembaga-lembaga nonpemerintah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diketahui bahwa model kemitraan yang terjalin antara pemerintah daerah dengan *Non Governmental Organization* (NGO) dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Kecamatan Panti merujuk pada model kemitraan *Pseudo Partnership* atau kemitraan semu. Adapun menurut pendapat Sulistiani, 2004 bahwasannya kemitraan semu yaitu merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Ada suatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.

BAB 5. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Bencana merupakan persoalan yang erat kaitannya dengan persoalan Administrasi Negara. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana bentuk penanganan mengenai bencana yang mana penanganan mengenai bencana merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam penanganan bencana bukan hanya berbentuk kegiatan tanggap darurat, akan tetapi banyak kegiatan-kegiatan lain yang salah satunya adalah kegiatan Pengurangan Risiko Bencana. Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan Pengurangan Risiko Bencana sendiri pemerintah mengalami kesulitan atau kendala sehingga pemerintah membutuhkan adanya suatu kerjasama atau kemitraan dalam kegiatan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan, maka dapat diketahui bahwasannya bentuk atau pola kemitraan yang terjadi pada pemerintah daerah dan *Non Governmental Organization (NGO)* dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana di Kecamatan Panti merupakan kemitraan dengan model *Pseudo Partnership* atau Kemitraan Semu, yaitu merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Ada suatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa. Jadi, dengan kemitraan model tersebut pada intinya Pihak Pemerintah dan Pihak NGO sama-sama merasa penting melakukan kerjasama dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana, akan tetapi masing-masing pihak tidak saling memahami dan berjalan

sendiri-sendiri meskipun pada dasarnya ke dua pihak tersebut memiliki tujuan utama yang sama yakni menjadikan Kecamatan Panti lebih maju dan tanggap bencana tanpa memperdulikan jabatan masing-masing pihak yang bermitra.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut.

1. Pemerintah Daerah setempat hendaknya mampu mempertahankan dan meningkatkan apa saja kegiatan yang telah dilakukan dalam Pengurangan Risiko Bencana di Kecamatan Panti;
2. Pemerintah Daerah mampu menjalin dan mempertahankan kerjasama/kemitraan dengan pihak-pihak atau lembaga terkait penanggulangan bencana dan Pengurangan Risiko Bencana.
3. Kemitraan-kemitraan Pemerintah Daerah dengan *Non Governmental Organization (NGO)* dalam Pengurangan Risiko Bencana seperti yang telah dilakukan di Kecamatan Panti cukup baik dan akan baik pula apabila diterapkan di daerah-daerah lain yang tergolong rawan bencana.